



# LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) TAHUN 2014

SEKRETARIAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN

## KATA PENGANTAR

Pergeseran nilai manajemen pemerintahan menjadi manajemen pemerintahan berbasis kinerja, yang berorientasi pada berapa besar kinerja yang dihasilkan dan kinerja tambahan yang diperlukan, agar tujuan yang telah ditetapkan dapat dicapai pada akhir periode perencanaan, mendorong instansi pemerintah untuk mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah bukan sekedar formalitas tetapi telah menjadi komitmen.

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sistem AKIP), merupakan suatu sistem akuntabilitas yang memadai yang dibangun dan dikembangkan dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya pelaksanaan kebijakan dan program yang diemban setiap instansi pemerintah. Dalam hal ini, setiap instansi pemerintah secara periodik wajib mengkomunikasikan pencapaian tujuan dan sasaran strategis organisasi kepada para stakeholders, yang dituangkan melalui Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Sekretariat Daerah Kota Balikpapan merupakan salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan yang berkomitmen untuk mengimplementasi akuntabilitas kinerja dalam manajemen pemerintahan.

Salah satu bentuk komitmen Sekretariat Daerah Kota Balikpapan adalah disusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Sekretariat Daerah Kota Balikpapan Tahun 2014. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Sekretariat Daerah Kota Balikpapan Tahun 2014 merupakan perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya pelaksanaan kebijakan dan program yang diemban Sekretariat Daerah Kota Balikpapan.

Berikut akan diuraikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Sekretariat Daerah Kota Balikpapan Tahun 2014, yang menjabarkan rencana kinerja tahunan, evaluasi dan analisis capaian kinerja serta akuntabilitas keuangan guna menyajikan satu informasi yang utuh atas upaya yang telah dilakukan dan capaian dari target pada tingkat sasaran program.

Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Sekretariat Daerah Kota Balikpapan Tahun 2014 diperlukan dalam penyempurnakan pelaksanaan akuntabilitas kinerja pada waktu yang akan datang.

SEKRETARIS DAERAH KOTA BALIKPAPAN



**SAYID MN FADLI**  
Pembina Utama Madya  
NIP.19620509 198701 1 001



## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	iii
RINGKASAN EKSEKUTIF .....	iv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. LATAR BELAKANG .....	1
B. TUGAS POKOK DAN FUNGSI .....	2
C. ASPEK STRATEGIS .....	3
D. STRUKTUR ORGANISASI .....	3
E. SISTEMATIKA PENULISAN .....	5
<b>BAB II PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA</b>	
A. RENCANA STRATEGI ORGANISASI	
1. VISI DAN MISI .....	6
2. TUJUAN DAN SASARAN .....	7
3. STRATEGI DAN KEBIJAKAN .....	13
4. RENCANA KINERJA .....	14
B. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) .....	20
C. PENETAPAN KINERJA 2014 .....	24
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA</b>	
A. PENGUNGKAPAN AKUNTABILITAS KINERJA .....	31
B. PENGUNGKAPAN AKUNTABILITAS KEUANGAN .....	57
<b>BAB IV PENUTUP</b>	
A. KESIMPULAN .....	98
B. SARAN .....	100
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	
1. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU);	
2. RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN 2012;	
3. PENETAPAN KINERJA TAHUN 2012;	
4. PENGUKURAN KINERJA	

## RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Sekretariat Daerah Kota Balikpapan disusun dengan tujuan memberikan gambaran konkrit mengenai keseluruhan pelaksanaan program dan kegiatan berdasarkan kinerja, yang merupakan tahun kedua pelaksanaan Rencana Strategis (RENSTRA) Sekretariat Daerah Kota Balikpapan Tahun 2011-2016.

Laporan ini berisi penetapan kinerja dan akuntabilitas kinerja, dimana termasuk didalamnya rencana kinerja tahunan, evaluasi dan analisis capaian kinerja serta akuntabilitas keuangan guna menyajikan satu informasi yang utuh atas upaya yang telah dilakukan dan tingkat capaian dari target pada tingkat sasaran program. Sesuai dengan Rencana Strategis (RENSTRA) Sekretariat Daerah Kota Balikpapan Tahun 2011-2016 dan mengacu pada Indikator Kinerja Utama, terdapat 6 (enam) Sasaran Strategis dengan 53 (lima puluh tiga) indikator kinerja dalam rangka pencapaian kinerja Sekretariat Daerah Kota Balikpapan.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap 6 (enam) sasaran strategis dan 53 (lima puluh tiga) indikator kinerja, disimpulkan bahwa :

1. Pencapaian sasaran 1

Sasaran 1 terdiri dari 27 indikator kinerja dengan realisasi capaian 102.7%

2. Pencapaian sasaran 2

Sasaran 2 terdiri dari 6 indikator kinerja dengan realisasi capaian 144%

3. Pencapaian sasaran 3

Sasaran 3 terdiri dari 8 indikator kinerja dengan realisasi capaian 113%

4. Pencapaian sasaran 4

Sasaran 4 terdiri dari 1 indikator kinerja dengan realisasi capaian 100%

5. Pencapaian sasaran 5

Sasaran 5 terdiri dari 9 indikator kinerja dengan realisasi capaian 89.92%

6. Pencapaian sasaran 6

Sasaran 6 terdiri dari 2 indikator kinerja dengan realisasi capaian 100%

Dengan melihat capaian kinerja tersebut, dilaksanakan evaluasi secara menyeluruh terhadap seluruh program kegiatan dengan tetap mengacu pada sasaran dan tujuan Rencana Strategis (RENSTRA) Sekretariat Daerah Kota Balikpapan Tahun 2011-2016 dalam rangka penyempurnaan kinerja yang lebih baik. Hasil evaluasi tersebut ditujukan sebagai bahan rujukan yang efektif bagi upaya perbaikan berkesinambungan serta optimalisasi kinerja Sekretariat Daerah Kota Balikpapan sebagai bagian dari upaya pembangunan Kota Balikpapan sekarang dan masa datang.

SEKRETARIS DAERAH KOTA BALIKPAPAN



**SAYID MN FADLI**  
Pembina Utama Madya  
NIP.19620509 198701 1 001

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. LATAR BELAKANG

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Sekretariat Daerah Kota Balikpapan Tahun 2014, merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah (Setda) sebagai salah satu penyelenggara Pemerintahan Kota Balikpapan dalam kerangka integrasi perwujudan Visi Kota Balikpapan.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini merupakan instrumen dan metode pertanggungjawaban pemerintah yang pada intinya mengungkapkan target perencanaan, pelaksanaan, dan pengukuran kinerja serta evaluasi dan analisa atas capaian kinerja hasil pelaksanaan tahun sebelumnya. LAKIP menjelaskan faktor-faktor keberhasilan atau kegagalan atas capaian realisasi target kinerja organisasi melalui pengelolaan sumber daya yang berbasis kinerja sebagai bagian dari pemenuhan kewajiban dalam perspektif transparansi dan akuntabilitas.

Penyusunan LAKIP Sekretariat Daerah Kota Balikpapan Tahun 2014 ditetapkan dan mengacu pada ketentuan dan peraturan perundangan, sebagai berikut :

1. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat RI Nomor X/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Laporan Kinerja kuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kota Balikpapan;
13. Peraturan Wali Kota Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Uraian Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah Kota Balikpapan.

## **B. TUGAS POKOK DAN FUNGSI**

Sesuai dengan Peraturan Wali Kota Nomor 35 Tahun 2012 tentang Uraian Tugas Dan Fungsi Sekretariat Daerah Kota Balikpapan, disebutkan bahwa tugas pokok Sekretaris Daerah adalah membantu Wali Kota dalam menyusun kebijakan dan mengoordinasikan Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan, Kelurahan dan Lembaga Perangkat Daerah lainnya dan mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan Pemerintah Kota;

- b. pengoordinasian dan pengendalian pelaksanaan tugas dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan, kelurahan dan lembaga perangkat daerah lainnya;
- c. pembinaan administrasi dan aparatur pemerintahan daerah;
- d. pelaksanaan tugas pemerintahan umum, pembangunan dan kemasyarakatan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- e. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah.

### C. ASPEK STRATEGIS

Aspek-aspek strategis yang diemban Sekretariat Daerah Kota Balikpapan meliputi :

- a. Adanya keselarasan kebijakan, program dan kegiatan dalam pelaksanaan otonomi daerah;
- b. Optimalisasi koordinasi di lingkup Pemerintah Kota Balikpapan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat;
- c. Berfungsinya mekanisme, prosedur dan pola kerja yang efektif dan efisien menuju tata kelola pemerintahan yang baik;
- d. Adanya sistem pelayanan yang mudah, aman, cepat, efisien, ekonomis, adil, transparan dan tepat sasaran;
- e. Tersedianya aparatur yang professional untuk mendorong meningkatkan kinerja, transparan dan persaingan yang sehat.

### D. STRUKTUR ORGANISASI

Di dalam Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah Paragraf 2 Perangkat Daerah Pasal 213 disebutkan Bahwa Sekretaris Daerah mempunyai tugas membantu Kepala Daerah dalam penyusunan Kebijakan dan Pengkoordinasian Administratif dalam pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelayanan administratif.

Oleh karena itulah peranan Sekretaris Daerah Kota Balikpapan semakin bertambah selaku koordinator dalam mewujudkan kebijakan umum Pemerintah Daerah yang akuntabel sekaligus selaku pengendali terhadap pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan.

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kota Balikpapan dan Peraturan Wali Kota Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Uraian Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah Kota Balikpapan, dimana Sekretaris Daerah dibantu oleh Tiga Asisten, sebagai berikut :

- 1) Asisten Tata Pemerintahan, dibantu :
  - a. Bagian Pemerintahan
  - b. Bagian Humas dan Protokol
  - c. Bagian Kerjasama Daerah, Administrasi Wilayah, dan Pertanahan
  - d. Bagian Hukum
  
- 2) Asisten Perekonomian, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat dibantu :
  - a. Bagian Perekonomian
  - b. Bagian Pembangunan
  - c. Bagian Kesejahteraan Rakyat
  
- 3) Asisten Administrasi Umum, dibantu :
  - a. Bagian Organisasi
  - b. Bagian Keuangan
  - c. Bagian Umum dan Perlengkapan

## **E. SISTEMATIKA PENULISAN**

Sistematika penulisan yang digunakan dalam penyusunan LAKIP ini adalah sebagai berikut :

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

RINGKASAN EKSEKUTIF

BAB I           PENDAHULUAN

- A. LATAR BELAKANG
- B. TUGAS POKOK DAN FUNGSI
- C. ASPEK STRATEGIS
- D. STRUKTUR ORGANISASI
- E. SISTEMATIKA PENULISAN

BAB II           RENCANA STRATEGI DAN PENETAPAN KINERJA

- A. RENCANA STRATEGI (RENSTRA)
  - 1. VISI DAN MISI
  - 2. TUJUAN DAN SASARAN
  - 3. STRATEGI DAN KEBIJAKAN
  - 4. RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN 2014
- B. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
- C. PENETAPAN KINERJA TAHUN 2014

BAB III          AKUNTABILITAS KINERJA

- A. PENGUNGKAPAN AKUNTABILITAS KINERJA
- B. PENGUNGKAPAN AKUNTABILITAS KEUANGAN

BAB IV          PENUTUP

- A. KESIMPULAN
- B. SARAN

LAMPIRAN-LAMPIRAN

## BAB II

### PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA

#### A. RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

Berdasarkan Undang – Undang nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Rencana Strategis disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah disebutkan bahwa Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode lima tahunan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada.

#### 1. VISI DAN MISI

Penetapan visi Sekretariat Daerah Kota Balikpapan adalah untuk menggambarkan kondisi yang diharapkan dalam 5 tahun ke depan. Agar visi tersebut dapat diwujudkan maka dirumuskan Misi yang akan dilaksanakan.

##### a. Visi Sekretariat Daerah Kota Balikpapan

Visi Sekretariat Daerah Kota Balikpapan dalam 5 tahun ke depan adalah :

**Terwujudnya Pelayanan Prima dan Koordinasi Yang Efektif  
Menuju Kepemerintahan Yang Baik**

**b. Misi Sekretariat Daerah Kota Balikpapan**

Dalam rangka untuk mewujudkan visi tersebut, Sekretariat Daerah Kota Balikpapan menetapkan 6 (enam) misi yang akan dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas administrasi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang tertib hukum.
2. Melaksanakan koordinasi, sinkronisasi dan sinergitas pelaksanaan tugas secara efektif dan efisien.
3. Mewujudkan profesionalisme dan kesejahteraan aparatur.
4. Melaksanakan pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel.
5. Mengembangkan sistem layanan berdasarkan prinsip pemerintahan yang baik.
6. Melaksanakan pengelolaan barang milik daerah dan pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana yang memadai untuk pelaksanaan tugas.

**2. TUJUAN DAN SASARAN**

Sebagaimana Visi dan Misi yang telah ditetapkan dan untuk keberhasilan tersebut perlu ditetapkan tujuan Sekretariat Daerah yang ditempuh melalui penetapan beberapa sasaran yang satu dengan lainnya saling berhubungan.

Hubungan Misi, Tujuan dan Sasaran Sekretariat Daerah adalah sebagai berikut :

**MISI 1**  
**Meningkatkan kualitas administrasi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang tertib hukum**

Tujuan 1 : Meningkatkan Kualitas layanan administrasi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dalam rangka mewujudkan Pelayanan Prima.

Sasaran : Peningkatan Penyelenggaraan pelayanan administrasi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;

Tujuan 2 : Peningkatan kesadaran hukum.

Sasaran : Melaksanakan penataan perundang-undangan;

**MISI 2**  
**Melaksanakan koordinasi, sinkronisasi dan sinergitas pelaksanaan tugas secara efektif dan efisien.**

Tujuan : Membangun pola sinergitas, koordinasi dan sinkronisasi.

Sasaran : Meningkatnya hubungan kerja

**MISI 3**  
**Mewujudkan profesionalisme dan kesejahteraan aparatur**

Tujuan : Meningkatnya profesional dan kesejahteraan aparatur

Sasaran : Meningkatnya profesional dan kesejahteraan aparatur  
Mengembangkan kompetensi aparatur.

**MISI 4**  
**Mengembangkan sistem layanan berdasarkan prinsip pemerintahan yang baik**

Tujuan : Optimalisasi kelembagaan, tatalaksana dan akuntabilitas

Sasaran : Penguatan ketatalaksanaan, kelembagaan dan akuntabilitas kinerja.

**MISI 5**  
**Mewujudkan pengelolaan sarana dan prasarana efektif dan efisien**

Tujuan : Optimalisasi pengelolaan sarana prasarana

Sasaran : Peningkatan sistem pengelolaan sarana prasarana

Indikator tujuan dan indikator sasaran dari rencana strategis Sekretaris Daerah Kota Balikpapan adalah sebagai berikut :

Tujuan 1 : Meningkatkan Kualitas layanan administrasi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dalam rangka mewujudkan Pelayanan Prima.

Indikator : Terwujudnya pelayanan prima

Sasaran : Penyelenggaraan pelayanan administrasi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;

Indikator :

1. Jumlah RT
2. Persentase Kelurahan berprestasi Tk. Kota
3. Persentase RT yang memiliki administrasi baik
4. Jumlah prestasi / penghargaan yang diterima Kota Balikpapan (Tk. Propinsi, Nasional dan Internasional)
5. Persentase penduduk yang memiliki KTP
6. Persentase penduduk yang memiliki akta kelahiran
7. Persentase SKPD yang telah melaksanakan IKM
8. Angka kemiskinan
9. Persentase pengadaan barang dan jasa melalui LPSE
10. Persentase permohonan bansos yang dapat ditindak lanjuti

11. Persentase permohonan hibah yang dapat ditindak lanjuti
12. Jumlah SKPD yang telah menerapkan Sistem Informasi Manajemen/aplikasi
13. Persentase proporsi belanja langsung dan belanja tidak langsung.
14. Persentase penyerapan anggaran belanja barang dan jasa
15. Jumlah dokumen Laporan Kegiatan
16. Persentase penyelesaian pertanahan
17. Nilai investasi
18. Angka inflasi dan PDRB
19. Angka Laju Pertumbuhan Ekonomi
20. Angka Prasarana, Sarana dan Utilitas
21. Penganekaragaman pangan
22. Persentase realisasi anggaran
23. Persentase administrasi batas wilayah
24. Jumlah operasi dalam rangka mewujudkan trantib
25. Persentase penerbitan rekomendasi pemanfaatan tanah Negara
26. Angka kriminalitas
27. Cakupan penanganan bencana

Tujuan 2 : Peningkatan kesadaran hukum.

Indikator : Masyarakat dan aparaturnya taat hukum

Sasaran : Melaksanakan penataan perundang-undangan;

Indikator : 28. Persentase penerbitan Peraturan Daerah  
29. Jumlah sosialisasi dan desimilasi Perda dan produk hukum lainnya

30. Jumlah :

- Perda
- Perwal
- Keputusan

31. Persentase keluarga sadar hukum

32. Jumlah pelanggaran PERDA

33. Persentase penyelesaian perkara hukum

Tujuan 3 : Membangun pola sinergitas, koordinasi dan sinkronisasi.

Indikator : Adanya pola sinergitas, koordinasi dan sinkronisasi.

Sasaran : Meningkatnya hubungan kerja

Indikator : 34. Jumlah *coffee morning*  
 35. Jumlah rapat MUSPIDA  
 36. Jumlah kunjungan kerja ke Pemkot Balikpapan  
 37. Jumlah kegiatan Kepala Daerah  
 38. Persentase tindak lanjut hasil *coffee morning*  
 39. Jumlah jumpa pers  
 40. Jumlah talk show  
 41. Jumlah kerjasama

Tujuan 4 : Meningkatnya profesional dan kesejahteraan aparatur

Indikator : Terwujudnya *aparatur yang professional dan sejahtera*

Sasaran : Meningkatnya profesional dan kesejahteraan aparatur  
 Mengembangkan kompetensi aparatur.

Indikator : 42. Jumlah kebijakan yang diterbitkan di bidang aparatur

Tujuan 5 : Optimalisasi kelembagaan, tatalaksana dan akuntabilitas

Indikator : Optimalnya kelembagaan, tatalaksana dan akuntabilitas

Sasaran : Penguatan ketatalaksanaan, kelembagaan dan akuntabilitas kinerja.

Indikator : 43. Persentase jumlah dokumen AKIP SKPD  
44. Persentase SKPD yang menyampaikan LAKIP tepat waktu  
45. Persentase SKPD yang menyampaikan laporan kegiatan bulanan tepat waktu  
46. Persentase SKPD yang memiliki SOP  
47. Persentase SKPD yang memiliki uraian jabatan  
48. Persentase jabatan yang telah memiliki standar kompetensi jabatan  
49. Persentase SKPD yang mendapatkan nilai BB pada penilaian LAKIP  
50. Persentase SKPD yang telah menggunakan *paperless office*  
51. Persentase PPID Pembantu di SKPD

Tujuan 6 : Optimalisasi pengelolaan sarana prasarana

Indikator : Optimalnya pengelolaan sarana prasarana

Sasaran : Peningkatan sistem pengelolaan sarana prasarana

Indikator 52. Tersedianya rencana kebutuhan barang  
53. Tersedianya sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan Tupoksi

### 3. STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Strategi yang digunakan untuk mencapai visi dan misi, adalah sebagai berikut

- a. Menyusun rencana dan mengkoordinasikan dalam perumusan kebijakan daerah.
- b. Meningkatkan dukungan sarana dan prasarana penyelenggaraan pemerintah daerah.
- c. Meningkatkan penyelenggaraan administrasi pemerintahan umum dan otonomi daerah.
- d. Menyusun rencana dan merumuskan pengembangan dan pembinaan hukum serta peraturan perundang-undangan.
- e. Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan pelayanan administratif bagi semua Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- f. Meningkatkan pengendalian dan sistem informasi pembangunan daerah.
- g. Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja.
- h. Menyusun konsep kebijakan penegakan disiplin aparatur, peningkatan etos dan budaya kerja, dan pemberdayaan aparatur daerah.
- i. Melaksanakan evaluasi dan penataan organisasi perangkat daerah serta analisis formasi jabatan.
- j. Menyusun rencana dan merumuskan ketatalaksanaan, sistem dan prosedur tata kerja, dan tertib administrasi kedinasan.
- k. Meningkatnya penyebaran informasi, program good governance.
- l. Menyusun rencana dan merumuskan pengembangan dan pembinaan perekonomian dan pembangunan.
- m. Menyiapkan rencana kebijakan program sosial dan kesra.

Sedangkan kebijakan yang akan dilaksanakan, antara lain :

- a. Pembinaan dan pengawasan tugas – tugas dinas, lembaga teknis daerah.

- b. Desentralisasi urusan wajib dan urusan pilihan serta model perencanaan dari bawah yang serasi dengan model perencanaan daerah.
- c. Standarisasi administrasi pemerintahan.
- d. Meningkatkan kualitas pemberdayaan masyarakat.
- e. Menindaklanjuti regulasi aturan pemerintah pusat dan menyelaraskan aturan daerah dan pusat.

#### 4. RENCANA KINERJA

Perencanaan Kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis, yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan.

Di dalam Rencana Kinerja ditetapkan rencana Capaian Kinerja Tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan, dimana penyusunan Rencana Kinerja dilaksanakan seiring dengan agenda penyusunan dari kebijakan anggaran serta merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu.

Dokumen Rencana Kinerja memuat informasi tentang : sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan, Indikator Kinerja dan Target.

Seiring dengan perubahan kelembagaan Sekretariat Daerah Kota Balikpapan, maka Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2014 juga mengalami perubahan dan penyempurnaan.

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2014 Sekretariat Daerah Kota Balikpapan sebagai berikut :

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET
1	2	3	4
1.	Peningkatan penyelenggaraan administrasi pemerintahan, keuangan, pembangunan, dan kemasyarakatan	1. Jumlah RT 2. Persentase Kelurahan berprestasi Tk. Kota 3. Persentase RT yang memiliki administrasi baik 4. Jumlah prestasi / penghargaan yang diterima Kota Balikpapan (Tk. Propinsi, Nasional dan Internasional) 5. Persentase penduduk yang memiliki KTP 6. Persentase penduduk yang memiliki akta kelahiran 7. Persentase SKPD yang telah melaksanakan IKM 8. Angka kemiskinan 9. Persentase pengadaan barang dan jasa melalui LPSE 10. Persentase permohonan bansos yang dapat ditindak lanjuti	1541 35,29% 60,54% 32 89% 65% 66% 10.112 RTS 70% 85%

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET
1	2	3	4
		11. Persentase permohonan hibah yang dapat ditindak lanjuti	90%
		12. Jumlah SKPD yang telah menerapkan Sistem Informasi Manajemen/aplikasi	53%
		13. Persentase proporsi belanja langsung dan belanja tidak langsung.	100%
		14. Persentase penyerapan anggaran belanja barang dan jasa	70%
		15. Jumlah dokumen Laporan Kegiatan	120
		16. Persentase penyelesaian pertanahan	70%
		17. Nilai investasi	5T
		18. Angka inflasi dan PDRB	6,41% dan 80803005(000)
		19. Angka Laju Pertumbuhan Ekonomi	10,6%
		20. Angka Prasarana, Sarana dan Utilitas	
		a. Jumlah angkutan	1945
		b. Jumlah Pasar Tradisional	17
		c. Jumlah Rumah Sakit	91

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET
1	2	3	4
		d. Jumlah Hotel	63
		e. Jumlah Restoran	390
		f. Jumlah Toko/supermarket	14
		g. Jumlah Bank	143
		h. Ketersediaan Listrik	191.169,70
		21. Penganekaragaman pangan	2
		22. Persentase realisasi anggaran	75%
		23. Persentase administrasi batas wilayah	100%
		24. Jumlah operasi dalam rangka mewujudkan trantib	125
		25. Persentase penerbitan rekomendasi pemanfaatan tanah Negara	320
		26. Angka kriminalitas	21
		27. Cakupan penanganan bencana	120
2.	Melaksanakan penataan perundang-undangan	28. Persentase penerbitan Peraturan Daerah	90%
		29. Jumlah sosialisasi dan desimilasi Perda dan produk hukum lainnya	100
		30. Jumlah :	
		➤ Perda	15
		➤ Perwal	20
		➤ Keputusan	400

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET
1	2	3	4
		31. Persentase keluarga sadar hukum	100%
		32. Jumlah pelanggaran PERDA	500 berkas
		33. Persentase penyelesaian perkara hukum	80%
3.	Meningkatnya hubungan kerja	34. Jumlah <i>coffee morning</i>	52
		35. Jumlah rapat MUSPIDA	23
		36. Jumlah kunjungan kerja ke Pemkot Balikpapan	12
		37. Jumlah kegiatan Kepala Daerah	254
		38. Persentase tindak lanjut hasil <i>coffee morning</i>	52
		39. Jumlah jumpa pers	13
		40. Jumlah talk show	12
		41. Jumlah kerjasama	3 naskah kerjasama
4.	Meningkatnya profesionalisme dan kesejahteraan aparatur	42. Jumlah kebijakan yang diterbitkan di bidang aparatur	1
5.	Penguatan ketatalaksanaan, kelembagaan dan akuntabilitas kinerja	43. Persentase jumlah dokumen AKIP SKPD	100%
		44. Persentase SKPD yang menyampaikan LAKIP tepat waktu	100%

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET
1	2	3	4
		45. Persentase SKPD yang menyampaikan laporan kegiatan bulanan tepat waktu	80%
		46. Persentase SKPD yang memiliki SOP	75%
		47. Persentase SKPD yang memiliki uraian jabatan	76%
		48. Persentase SKPD yang telah memiliki standar kompetensi jabatan	80%
		49. Persentase SKPD yang mendapatkan nilai BB pada penilaian LAKIP	70%
		50. Persentase SKPD yang telah menggunakan <i>paperless office</i>	100%
		51. Persentase PPID Pembantu di SKPD	
6.	Meningkatnya sistem pengelolaan Sarana dan prasarana	52. Tersedianya rencana kebutuhan barang	10
		53. Tersedianya sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan Tupoksi	12

## B. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Demi terarahnya pencapaian visi dan misi Sekretariat Daerah Kota Balikpapan Tahun 2011-2016 yang termuat dalam RENSTRA Sekretariat Daerah Kota Balikpapan tahun 2011-2016 maka diperlukan tolak ukur yang jelas dan sistematis untuk mengukur kinerja pembangunan pada setiap tahun perencanaannya yang dituangkan dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretariat Daerah Kota Balikpapan Tahun 2011 – 2016.

Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretariat Daerah Kota Balikpapan Tahun 2011 – 2016 adalah sebagai berikut :

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SUMBER DATA
1	2	3	
1.	Peningkatan penyelenggaraan administrasi pemerintahan, keuangan, pembangunan, dan kemasyarakatan	1. Jumlah RT 2. Persentase Kelurahan berprestasi Tk. Kota 3. Persentase RT yang memiliki administrasi baik 4. Jumlah prestasi/penghargaan yang diterima Kota Balikpapan(Tk. Propinsi, Nasional dan Internasional) 5. Persentase penduduk yang memiliki KTP 6. Persentase penduduk yang memiliki akta kelahiran 7. Persentase SKPD yang telah melaksanakan IKM 8. Angka kemiskinan	Bagian Pemerintahan Bagian Pemerintahan Bagian Pemerintahan Bagian Humpro DISDUKCAPIL DISDUKCAPIL Bagian Organisasi Bagian Perekonomian

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SUMBER DATA
1	2	3	
		9. Persentase pengadaan barang dan jasa melalui LPSE	Bagian Pembangunan
		10. Persentase permohonan bansos yang dapat ditindak lanjuti	Bagian Kesra
		11. Persentase permohonan hibah yang dapat ditindak lanjuti	Bagian Kesra
		12. Jumlah SKPD yang telah menerapkan Sistem Informasi Manajemen/aplikasi	Bagian Organisasi
		13. Persentase proporsi belanja langsung dan belanja tidak langsung.	Bagian Pembangunan
		14. Persentase penyerapan anggaran belanja barang dan jasa	Bagian Pembangunan
		15. Jumlah dokumen Laporan Kegiatan	Bagian Pembangunan
		16. Persentase penyelesaian pertanahan	Bagian KDAWP
		17. Nilai investasi	Bagian Perekonomian
		18. Angka inflasi dan PDRB	Bagian Perekonomian
		19. Angka Laju Pertumbuhan Ekonomi	Bagian Perekonomian
		20. Angka Prasarana, Sarana dan Utilitas	Bagian Perekonomian
		21. Penganekaragaman pangan	Bagian Perekonomian
		22. Persentase realisasi anggaran	Bagian Keuangan
		23. Persentase administrasi batas wilayah	Bagian KDAWP

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SUMBER DATA
1	2	3	
		24. Jumlah operasi dalam rangka mewujudkan trantib 25. Persentase penerbitan rekomendasi pemanfaatan tanah Negara 26. Angka kriminalitas 27. Cakupan penanganan bencana	Bagian Pemerintahan  Bagian KDAWP  Fungsional Polres Bagian Pemerintahan
2.	Melaksanakan penataan perundang-undangan	28. Persentase penerbitan Peraturan Daerah 29. Jumlah sosialisasi dan desimilasi Perda dan produk hukum lainnya 30. Jumlah : <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Perda</li> <li>➤ Perwal</li> <li>➤ Keputusan</li> </ul> 31. Persentase keluarga sadar hukum 32. Jumlah pelanggaran PERDA 33. Persentase penyelesaian perkara hukum	Bagian Hukum  Bagian Hukum  Bagian Hukum  Bagian Hukum Satpol PP Bagian Hukum
3.	Meningkatnya hubungan kerja	34. Jumlah <i>coffee morning</i> 35. Jumlah rapat MUSPIDA  36. Jumlah kunjungan kerja ke Pemkot Balikpapan 37. Jumlah kegiatan Kepala Daerah 38. Persentase tindak lanjut hasil <i>coffee morning</i> 39. Jumlah jumpa pers	Bagian Humpro Bagian Umum dan Perlengkapan Bagian Pemerintahan  Bagian Humpro Bagian Humpro Bagian Humpro

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SUMBER DATA
1	2	3	
		40. Jumlah talk show 41. Jumlah kerjasama	Bagian Humpro Bagian KDAWP
4.	Meningkatnya profesionalisme dan kesejahteraan aparatur	42. Jumlah kebijakan yang diterbitkan di bidang aparatur	Bagian Organisasi
5.	Penguatan ketatalaksanaan, kelembagaan dan akuntabilitas kinerja	43. Persentase jumlah dokumen AKIP SKPD 44. Persentase SKPD yang menyampaikan LAKIP tepat waktu 45. Persentase SKPD yang menyampaikan laporan kegiatan bulanan tepat waktu 46. Persentase SKPD yang memiliki SOP 47. Persentase SKPD yang memiliki uraian jabatan 48. Persentase jabatan yang telah memiliki standar kompetensi jabatan 49. Persentase SKPD yang mendapatkan nilai BB pada penilaian LAKIP 50. Persentase SKPD yang telah menggunakan <i>paperless office</i> 51. Persentase PPID Pembantu di SKPD	Bagian Organisasi Bagian Organisasi Bagian Pembangunan Bagian Organisasi Bagian Organisasi Bagian Organisasi Bagian Organisasi Bagian Organisasi Bagian Humpro

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SUMBER DATA
1	2	3	
6.	Meningkatnya sistem pengelolaan dan prasarana Sarana	52. Tersedianya rencana kebutuhan barang 53. Tersedianya sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan Tupoksi	Bagian umum Perlengkapan Bagian umum Perlengkapan

### C. PENETAPAN KINERJA 2014

Dokumen penetapan kinerja adalah dokumen yang berupa pernyataan komitmen serta janji dalam mencapai target kinerja tertentu. Dokumen ini merupakan suatu kesepakatan kinerja yang akan diwujudkan oleh seorang pejabat penerima amanah, sekaligus sebagai pimpinan suatu unit/organisasi atau instansi kepada atasan langsungnya. penetapan kinerja juga menggambarkan capaian kinerja yang akan diwujudkan oleh suatu instansi pemerintah/ unit kerja dalam suatu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya.

Dokumen penetapan kinerja disusun setelah ada kejelasan mengenai alokasi anggaran. Hal ini dimaksudkan agar dokumen penetapan kinerja dapat disusun secara lebih realistis dengan mempertimbangkan ketersediaan sumber dana yang nyata sudah akan diperoleh.

Seiring dengan perkembangan APBD Kota Balikpapan dan hasil penataan organisasi di lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan, bahwa penetapan kinerja Sekretariat Daerah Kota Balikpapan tahun 2014 mengalami perubahan seiring dengan penetapan APBD Perubahan Tahun 2014.

Secara rinci, penetapan kinerja Sekretariat Daerah Kota Balikpapan Tahun 2014 adalah sebagai berikut :



NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	PROGRAM KEGIATAN	ANGGARAN
1	2	3	4	5	6
1	Peningkatan penyelenggaraan administrasi pemerintahan, keuangan, pembangunan, dan kemasyarakatan	1 Jumlah RT	1542	-	-
		2 Persentase Kelurahan berprestasi	100%	Lomba lurah berprestasi tingkat Kota Balikpapan	Rp 101.342.000,00
		3 Persentase RT yang memiliki administrasi baik	100%	Lomba pengelolaan administrasi RT tingkat Kota	Rp 272.002.000,00
		4 Jumlah prestasi / penghargaan yang diterima Kota Balikpapan (Tk. Propinsi, Nasional dan Internasional)	20	-	-
		5 Persentase penduduk yang memiliki KTP	100%	Penataan Administrasi Kependudukan	Rp 711.200.500,00
		6 Persentase penduduk yang memiliki akta kelahiran	90%	Penataan Administrasi Kependudukan	Rp 651.230.000,00
		7 Persentase SKPD yang telah melaksanakan IKM	100%	Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat	Rp 222.700.000,00
		8 Angka kemiskinan	10.122	Operasional Program Raskin	Rp 444.676.000,00
		9 Persentase pengadaan barang dan jasa melalui <i>e-procurement</i>	100%	Kelompok kerja ULP	Rp 675.400.000,00
		10 Persentase permohonan bansos yang dapat ditindak lanjuti	90%	Belanja tidak langsung	Rp 15.000.000.000,00
		11 Persentase permohonan hibah yang dapat ditindak lanjuti	95%	Belanja tidak langsung	Rp 80.704.688.500,00



NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	PROGRAM KEGIATAN	ANGGARAN
1	2	3	4	5	6
		12 Jumlah SKPD yang telah menerapkan Sistem Informasi Manajemen/aplikasi	67	Pengembangan komunikasi, informasi dan media massa	Rp 2.963.488.000,00
		13 Persentase proporsi belanja langsung dan belanja tidak langsung	100%	10 Program Kegiatan	Rp 6.481.098.500,00
		14 Persentase penyerapan anggaran belanja barang dan jasa	100%	10 Program Kegiatan	Rp 3.372.418.000,00
		15 Jumlah dokumen Laporan Kegiatan	4 buku	Pengembangan Sistem Evaluasi dan Pelaporan	Rp 277.455.500,00
		16 Persentase penyelesaian pertanahan	100% (25 rapat)	Penyelesaian Konflik pertanahan	Rp 57.800.000,00
		17 Nilai investasi	5T	-	-
		18 Angka inflasi dan PDRB	80.803.005	-	-
		19 Angka Laju Pertumbuhan Ekonomi	10,60%	-	-
		20 Angka Prasarana, Sarana dan Utilitas			
		Jumlah angkutan	1.945	-	-
		jumlah pasar tradisional	17	-	-
		jumlah rumah sakit	91	-	-
		jumlah hotel	63	-	-



NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	PROGRAM KEGIATAN	ANGGARAN
1	2	3	4	5	6
		Jumlah Restoran	390	-	-
		Jumlah Toko/ supermarket	14	-	-
		Jumlah Bank	143	-	-
		Ketersediaan Listrik	204.551,60	-	-
		21 Penganekaragaman pangan	2	Diversifikasi Pangan	Rp 100.000.000,00
		22 Persentase realisasi anggaran	80%	-	-
		23 Persentase administrasi batas wilayah	PBU : 30 PBA : 50	Penataan Daerah Otonomi Baru	Rp 1.205.990.000,00
		24 Jumlah operasi dalam rangka mewujudkan trantib	13	Peningkatan kemandirian dan kenyamanan lingkungan	Rp 3.440.000.000,00
		25 Persentase penerbitan rekomendasi pemanfaatan tanah Negara	1925 bidang	Penataan, Penguasaan, Pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	Rp 9.996.500.000,00
		26 Angka kriminalitas	2.189	-	-
		27 Cakupan penanganan bencana	69	Penanganan Kejadian Bencana dan kebakaran	Rp 2.000.000.000,00
2	Melaksanakan penataan perundang-undangan	28 Persentase penerbitan Peraturan Daerah	80%	Proses legislasi produk hukum	Rp 1.200.000.000,00
		29 Jumlah sosialisasi dan desimilasi Perda dan produk hukum	34	Penyuluhan Produk Hukum	Rp 373.956.600,00



NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	PROGRAM KEGIATAN	ANGGARAN
1	2	3	4	5	6
		30 Jumlah :		Pembuatan produk hukum	Rp 1.199.871.723,00
		1. Perda	6		
		2. Perwal	15		
		3. Keputusan	500		
		31 Persentase keluarga sadar hukum	100%	Pembinaan Keluarga sadar hukum	Rp 200.000.000,00
		32 Jumlah pelanggaran PERDA	400 berkas	Pelaksanaan penyidikan pelanggaran peraturan Daerah	Rp 150.000.000,00
		33 Persentase penyelesaian perkara hukum	12 perkara	Penyusunan legal opinion	Rp 150.000.000,00
3	Meningkatnya hubungan kerja	34 Jumlah <i>coffee morning</i>	60	-	-
		35 Jumlah rapat MUSPIDA	23	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/ wakil Kepala Daerah	Rp 2.000.000.000,00
		36 Jumlah kunjungan kerja ke Pemkot Balikpapan	76	Fasilitasi Penerimaan Kunjungan Kerja Pemerintah Daerah dan DPRD Provinsi/ Kabupaten/Kota	Rp 100.000.000,00
		37 Jumlah kegiatan Kepala Daerah	250	-	-
		38 Persentase tindak lanjut hasil <i>coffee morning</i>	100%	-	-



NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	PROGRAM KEGIATAN	ANGGARAN
1	2	3	4	5	6
		39 Jumlah jumpa pers	24	Kerjasama informasi dan media massa	Rp 168.000.000,00
		40 Jumlah talk show	12	Kerjasama informasi dan media massa	Rp 43.500.000,00
		41 Jumlah kerjasama	3 naskah kerjasama	Peningkatan kerjasama antar pemerintah daerah kegiatan	Rp 996.025.000,00
4	Meningkatnya profesionalisme dan kesejahteraan aparatur	42 Jumlah kebijakan yang diterbitkan di bidang aparatur	1 draft Perwal	-	-
5	Penguatan ketatalaksanaan, kelembagaan dan akuntabilitas kinerja	43 Persentase jumlah dokumen AKIP SKPD	100%	-	-
		44 Persentase SKPD yang mengumpulkan LAKIP tepat waktu	100%	-	-
		45 Persentase SKPD yang menyampaikan laporan kegiatan bulanan tepat waktu	100%	Pengembangan sistem evaluasi dan Pelaporan Pembangunan	Rp 277.455.500,00
		46 Persentase SKPD yang memiliki SOP	34 SKPD	-	-
		47 Persentase SKPD yang memiliki uraian jabatan	100%	Penyempurnaan dan Penataan Kelembagaan	Rp 250.000.000,00
		48 Persentase SKPD yang memiliki standar kompetensi jabatan	80	Penyempurnaan dan Penataan Kelembagaan	Rp 90.000.000,00
		49 Persentase SKPD yang mendapatkan nilai BB pada penilaian LAKIP	70%	-	-

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	PROGRAM KEGIATAN	ANGGARAN
1	2	3	4	5	6
		50 Persentase SKPD yang telah menggunakan <i>paperless office</i>	100%	Implementasi Paperless system	Rp 25.000.000,00
		51 Persentase PPID Pembantu di SKPD	100%	-	-
6	Meningkatnya sistem pengelolaan Sarana dan prasarana	52 Tersedianya rencana kebutuhan barang	10 Bagian	-	-
		53 Tersedianya sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan Tupoksi	12 Kegiatan	Program peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp 65.109.250.000,00

### **BAB III**

## **AKUNTABILITAS KINERJA**

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah.

Sekretariat Daerah selaku pelaksana sebagian kebijakan Pemerintah Daerah harus melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Daerah Kota Balikpapan yang dibuat sesuai ketentuan yang terkandung dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan tersebut diatas memberikan gambaran mengenai tingkatan pencapaian Kinerja baik keberhasilan-keberhasilan kinerja yang telah dicapai maupun kegagalan pada periode tahun tertentu.

#### **A. PENGUNGKAPAN AKUNTABILITAS KINERJA**

Mengacu pada ketentuan yang berlaku dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, laporan Kinerja Sekretariat Daerah Kota Balikpapan diukur berdasarkan Tingkat Pencapaian Kinerja Sasaran Strategis. Untuk mengetahui gambaran mengenai Tingkat Pencapaian Kinerja Sasaran Strategis



dilakukan melalui media Penetapan Kinerja yang kemudian dibandingkan dengan realisasinya dalam hal ini pengukuran kinerja.

Pencapaian Sasaran diperoleh dengan cara membandingkan target dengan Realisasi Indikator Sasaran melalui media **formulir Pengukuran Kinerja**. Kemudian atas hasil pengukuran kinerja tersebut dilakukan evaluasi untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis yang terkait dengan *Core Area* Sekretariat Daerah Kota Balikpapan sebagai institusi yang mewujudkan Pelayanan Prima Dan Koordinasi Yang Efektif Menuju Pemerintahan Yang Baik.

Untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian sasaran dan program/kegiatan diberlakukan nilai disertai makna dari nilai tersebut yaitu:

- **85 s.d. 100 = Baik Sekali**
- **70 s.d. <85 = Baik**
- **55 s.d. <70 = Cukup**
- **< 55 = Kurang**

Berikut akan diuraikan tentang informasi pencapaian sasaran strategis Sekretariat Daerah Kota Balikpapan.

**Sasaran 1**  
**Penyelenggaraan pelayanan administrasi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan**

INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	%	PROGRAM KEGIATAN
1	2	3	4	5
1. Jumlah RT	1.542	1.542	100%	Pembinaan RT Tingkat Kota Balikpapan

INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	%	PROGRAM KEGIATAN
1	2	3	4	5
2. Persentase Kelurahan berprestasi Tk. Kota	100% (6 Kel)	100% (6 Kel)	100%	Pembinaan dan Pemberian Reward Lurah Berprestasi 2013
3. Persentase RT yang memiliki dokumen administrasi baik	100% (1.542)	100% (1.542)	100%	Pengadaan buku administrasi Kecamatan, Kelurahan dan RT
4. Jumlah prestasi/penghargaan yang diterima Kota Balikpapan (Tk. Propinsi, Nasional dan Internasional)	20	42	210%	-
5. Persentase penduduk yang memiliki KTP	100%	85%	85%	-
6. Persentase penduduk yang memiliki akta kelahiran	90%	80%	89%	-
7. Persentase SKPD yang telah melaksanakan IKM	100% (140 UPP)	100% (140 UPP)	100%	Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
8. Angka kemiskinan	10.112	7.782	77%	Operasional Program Raskin

INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	%	PROGRAM KEGIATAN
1	2	3	4	5
9. Persentase pengadaan barang dan jasa melalui LPSE	100%	98.89%	98.89%	Kelompok Kerja ULP
10. Persentase permohonan bansos yang dapat ditindak lanjuti	90%	77.58%	86.2%	Program Bantuan sosial Pemerintah Kota Balikpapan Kepada Anggota Masyarakat
11. Persentase permohonan hibah yang dapat ditindak lanjuti	95%	85.33%	89.82%	Program Pemberian hibah Pemerintah kota Balikpapan Kepada Badan/ Lembaga/ Organisasi
12. Jumlah SKPD yang telah menerapkan Sistem Informasi Manajemen/aplikasi	67	67	100%	Pengembangan komunikasi, informasi dan media massa
13. Persentase proporsi belanja langsung dan belanja tidak langsung.	BL : 75% BTL : 25%	BL : 73,04% BTL : 26,96%	BL : 97% BTL : 107%	8 Program Kegiatan
14. Persentase penyerapan anggaran belanja barang dan jasa	100%	81%	81%	8 Program Kegiatan



INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	%	PROGRAM KEGIATAN
1	2	3	4	5
15. Jumlah dokumen Laporan Kegiatan	4 buku	5 buku	1.25%	Pengembangan sistem evaluasi dan pelaporan pembangunan
16. Persentase penyelesaian pertanahan	100%	83%	83%	Penyelesaian konflik-konflik pertanahan
17. Nilai investasi	5 T	8 T	100%	-
18. Angka inflasi dan PDRB	6%	7,43%	16.12%	-
19. Angka Laju Pertumbuhan Ekonomi	10.6	8.81	83%	-
20. Angka Prasarana, Sarana dan Utilitas	100% (8 keg)	100% (8 keg)	100%	-
21. Penganekaragaman pangan	2	2	100%	-
22. Persentase realisasi anggaran	80%	72,56%	90,7%	Penyusunan Laporan dan realisasi Anggaran Setdakot Balikpapan
23. Persentase administrasi batas wilayah	PBU : 30, PBA : 50	PBU : 30, PBA : 50	100%	Penataan Daerah Otonomi Baru
24. Jumlah operasi dalam rangka mewujudkan trantib	13	13	100%	Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan

INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	%	PROGRAM KEGIATAN
1	2	3	4	5
25. Persentase penerbitan rekomendasi pemanfaatan tanah Negara	3.385 Bidang	3.385 Bidang	100%	Peninjauan lokasi, pengukuran dan penerbitan Izin Membuka/Memanfaatkan Tanah Negara
26. Angka kriminalitas	2.189	2.673	122%	-
27. Cakupan penanganan bencana	69	249	361%	Penanganan Kejadian Bencana dan Kebakaran

Dibandingkan dengan rencana strategis Sekretariat Daerah Kota Balikpapan pada target tahun 2014, pencapaian sasaran 1 penyelenggaraan pelayanan administrasi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan telah mencapai target yang ditetapkan sehingga diyakini pada akhir tahun capaian perencanaan strategis dapat dipenuhi.

Hal-hal yang perlu mendapat perhatian pada pencapaian sasaran 1 penyelenggaraan pelayanan administrasi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan antara lain :

1. Pada tahun 2014 persentase penduduk yang memiliki KTP di Kota Balikpapan mencapai 85%, hal ini berdasarkan jumlah penduduk yang memiliki e-KTP yang sudah di cetak dan didistribusikan ke wajib KTP, sedangkan untuk wajib KTP yang belum memiliki e-KTP sebenarnya sudah memiliki KTP lokal Balikpapan. Dari data tersebut sesungguhnya capaian persentase penduduk yang memiliki KTP adalah 100%.

2. Salah satu faktor pengukur penduduk yang memiliki akte kelahiran adalah domosili tempat tinggal bukan asas tempat kelahiran, persentase penduduk yang memiliki akta kelahiran di Kota Balikpapan mencapai 89% dari target. Hal ini terjadi karena sebagian masyarakat yang melaksanakan persalinana/kelahiran di Balikpapan berasal dari Luar Balikpapan dan mengurus akta kelahiran di luar Kota Balikpapan.
3. Angka kemiskinan yang mengalami penurunan dari 10.112 menjadi 7.782 (77%). Hal ini dikarenakan program – program yang di jalankan pemerintah kota Balikpapan dapat dikatakan cukup berhasil. Program – program tersebut meliputi bidang Pendidikan, Kesehatan dan program Operasional Pembagian Beras Miskin, yang semuanya terdaftar dalam kartu keluarga miskin (Kartu Gakin). Bidang Pendidikan meliputi pemberian dana bea siswa kepada siswa gakin dengan menggunakan kartu gakin tersebut dapat mengambil dana bea siswa di Kantor Pos. Pemberian pelatihan kepada gakin yang meliputi pelatihan salon, menjahit, perbaikan mesin (mekanik) yang di peruntukan untuk memberikan keterampilan agar dapat menciptakan pekerjaan sendiri. Dibidang kesehatan melalui kartu gakin mendapatkan jamkesmas untuk pembiayaan berobat ketika sakit.
4. Angka laju pertumbuhan ekonomi pada tahun 2014 mengalami kelambatan meskipun secara kuantitas nilai PDRB mengalami kenaikan. Lambatnya Laju pertumbuhan Ekonomi disebabkan Kenaikkan Harga Minyak Dunia, Melemahnya nilai Rupiah Terhadap Dollar, Kenaikkan Tarif Dasar Listrik.
5. Pada Tahun 2014 Nilai investasi mengalami kenaikan dari 5T menjadi 8T, Investasi di Kota Balikpapan mengalami kenaikan di karenakan suasana kondusif yang di miliki Kota Balikpapan yang menjadi daya tarik utama para infestor untuk berinfestasi. Selain itu kota Balikpapan yang menjadi pintu Gerbangnya Kalimantan Timur melalui jalur udara terdapatnya Bandara Internasional Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggian yang baru, melalui jalur

- Laut adanya Pelabuhan Semayang. Dan Di Kota Balikpapan juga memiliki kawasan Industri Kariangau (KIK). Dan juga Semakin gencarnya Kota Balikpapan melakukan promosi baik dalam maupun luar negeri melalui BPMP2T.
6. Indikator penyelesaian pertanahan berada pada capaian 83%, mengingat proses penyelesaian tanah memerlukan proses dan pengolahan administrasi serta negosiasi dengan masyarakat yang memerlukan waktu lebih panjang.
  7. Realisasi Bantuan sosial tahun 2014 yang dapat ditindak lanjuti 86.20%, yang meliputi bantuan sosial terencana dan bantuan sosial tidak terencana. Hal ini disebabkan oleh jumlah permohonan realisasi pencairan dana bantuan sosial tidak terencana, tidak sepenuhnya terealisasi. Bantuan sosial tidak terencana tersebut diperuntukan bagi individu dan atau keluarga yang mengalami bencana alam dan resiko sosial, sehingga alokasi penggunaan dana tersebut bersifat insidental. Perbandingan dengan realisasi belanja hibah yang dapat ditindaklanjuti sebesar 89.82%, dikarenakan jumlah permohonan pencairan dana hibah tidak sepenuhnya di realisasikan oleh calon penerima hibah yang telah ditetapkan sebelumnya oleh Wali Kota pada anggaran belanja hibah APBD Tahun 2014. Permasalahan tersebut dikarenakan tidak lengkapnya dokumen persyaratan yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, terjadi konflik internal pada lembaga/organisasi calon penerima hibah serta penyerahan berkas permohonan hibah tersebut telah melewati batas waktu permohonan realisasi dana hibah Pemerintah Kota Balikpapan.
  8. Indikator angka kriminalitas masih tinggi yaitu berada di angka 2.673. Terjadi karena penambahan penduduk yang cukup tinggi mencapai 38% per tahun disebabkan faktor imigrasi penduduk yang berasal dari luar daerah Kota Balikpapan. Diharapkan adanya koordinasi yang baik dengan pihak keamanan untuk meningkatkan kantibmas di wilayah Kota Balikpapan.

9. Dalam mewujudkan ketentraman dan ketertiban Kota Balikpapan, pada tahun 2014 terlaksana sebanyak 13 kegiatan. Adapun program dan kegiatan yang dilaksanakan adalah :

- Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan tidak kriminal
  - A. koordinasi ketentraman dan ketertiban dalam rangka penegakan peraturan daerah kota Balikpapan.
  - B. Penindakan, penyelidikan, monitoring dan evaluasi terhadap pelanggaran perda.
  - C. Pengamanan, penjagaan dan pengawalan.
  - D. koordinasi ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, perlindungan masyarakat dengan instansi terkait selama perayaan Hari Besar tahun 2014.
  - E. koordinasi operasi penertiban dan pengawasan ketentraman dan ketertiban dalam perayaan hari besar agama.

Seiring dengan pemekaran Berdasarkan Keputusan Wali Kota Balikpapan Nomor 188.45-240/2014 Tanggal 28 April 2014 Tentang Penetapan Lurah Berprestasi Kota Balikpapan 2014, telah ditetapkan 6 (enam) Lurah berprestasi Kota Balikpapan Tahun 2014, yaitu :

1. Suwandi (Lurah Manggar)
2. Suliansyah (Lurah Klandasan Ulu)
3. Nyoto Harsono (lurah Sepinggian)
4. Aditya Eka W (lurah Kariangau)
5. Suparli (lurah Gn. Sari Ilir)
6. Purwantoro (lurah Muara Rapak)

Pemenang Pertama Lurah Berprestasi Kota Balikpapan mewakili Kota Balikpapan dalam Lomba Lurah Berprestasi Tingkat Propinsi Kalimantan Timur dan mendapatkan dana pembinaan sebesar Rp. 13.125.000,- untuk peringkat 2 diberikan dana pembinaan sebesar Rp. 10.500.000,- untuk peringkat 3 diberikan dana pembinaan sebesar Rp. 7.875.000,- Sedangkan untuk peringkat 4 sampai 6 diberikan dana pembinaan sebesar Rp. 5.250.000.

Selain lomba Lurah Berprestasi Kota Balikpapan tahun 2014 juga mengadakan Lomba Camat Berprestasi Kota Balikpapan. Berdasarkan Keputusan Wali Kota Balikpapan Nomor 188.45-528/2014 Tanggal 11 agustus 2014 tentang Camat Berprestasi Kota Balikpapan Tahun 2014, telah di tetapkan 2 (dua) Camat Berprestasi Kota Balikpapan Tahun 2014, yaitu :

1. Masrani Subiyani (Camat Balikpapan Selatan)
2. Ardiansyah (Camat Balikpapan Timur)

Pemenang Pertama Camat Berprestasi Kota Balikpapan mewakili Kota Balikpapan dalam Lomba Camat Berprestasi Tingkat Propinsi Kalimantan Timur dan Mendapatkan dana pembinaan sebesar Rp. 17.250.000,- sedangkan untuk peringkat 2 diberikan dana pembinaan sebesar Rp. 11.500.000,-

Untuk Lomba Pengelolaan Terbaik Administrasi Rukun Tetangga (RT) kota Balikpapan untuk tahun 2014 ditiadakan karena Lomba Pengelolaan Terbaik Administrasi Rukun Tetangga hanya pada Tingkat Kecamatan saja tidak sampai pada tingkat provinsi, maka lomba pengelolaan terbaik administrasi rukun tetangga berada dalam pengelolaan administrasi kecamatan sekretariat hanya sebagai pemantau saja.

Pelaksanaan survey indeks kepuasan masyarakat di lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan pada Tahun 2014 dilaksanakan berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara RI Nomor: Kep/25/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah.

Survei IKM Tahun 2014 dilaksanakan pada 140 SKPD dan unit kerja penyelenggara pelayanan, telah melampaui target tahun 2013 yaitu 130 SKPD dan Unit Kerja Penyelenggara pelayanan. Hal ini dapat tercapai karena ada penambahan beberapa SKPD dan sekolah yang perlu dilakukan survey indeks kepuasan masyarakat. Survei IKM dilakukan secara swadaya dengan melibatkan peran serta tim surveyor yang terdiri dari Penyuluh KB, Pengawas Sekolah dan PNS Bagian Organisasi.

Survei IKM dilaksanakan pada 140 SKPD dan unit kerja penyelenggara pelayanan, yang terdiri dari :

- a. SKPD : 15
- b. Kecamatan : 6
- c. Kelurahan : 34
- d. Puskesmas : 26
- e. SD : 29
- f. SMP : 15
- g. SMA : 9
- h. SMK : 6

Pelaksanaan paket pekerjaan yang dilaksanakan melalui proses lelang pada Unit Layanan Pengadaan tahun 2014 sebanyak 447 paket bertambah dari tahun 2013 yang berada di angka 430 paket.

Sedangkan Untuk Belanja Langsung mengalami sedikit penurunan disebabkan :

1. Penghematan Biaya Lelang
2. Pengurangan Biaya Perjalanan
3. Pembebasan lahan yang masih belum terselesaikan.

Untuk Belanja Tidak Langsung mengalami sedikit Kenaikkan hal ini disebabkan :

1. Adanya Kenaikkan Gaji PNS
2. Adanya Kenaikkan Pangkat/golongan PNS
3. Adanya Kenaikkan Gaji Berkala PNS
4. Adanya Kenaikkan Tunjangan Kerja PNS

Pencapaian sasaran strategis kesatu ini, jika dibandingkan dengan capaian tahun 2013 adalah sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA UTAMA	TAHUN 2013	TAHUN 2014
1	2	3
1. Jumlah RT	1.542	1.542
2. Persentase Kelurahan berprestasi Tk. Kota	35.28%	100%
3. Persentase RT yang memiliki administrasi baik	53.92%	100%
4. Jumlah prestasi / penghargaan yang diterima Kota Balikpapan (Tk. Propinsi, Nasional dan Internasional)	48	42
5. Persentase penduduk yang memiliki KTP	90%	85%
6. Persentase penduduk yang memiliki akta kelahiran	80%	80%
7. Persentase SKPD yang telah melaksanakan IKM	128%	100%
8. Angka kemiskinan	10.065	7.782
9. Persentase pengadaan barang dan jasa melalui ULP	70%	98.89%
10. Persentase permohonan bansos yang dapat ditindak lanjuti	79.82%	77.58%

INDIKATOR KINERJA UTAMA	TAHUN 2013	TAHUN 2014
1	2	3
11. Persentase permohonan hibah yang dapat ditindak lanjuti	92.73%	85.33%
12. Jumlah SKPD yang telah menerapkan Sistem Informasi Manajemen/aplikasi	46	67
13. Persentase proporsi belanja langsung dan belanja tidak langsung.	73.76% : 26.24%	73,04% : 26,96%
14. Persentase penyerapan anggaran belanja barang dan jasa	95.13%	81%
15. Jumlah dokumen Laporan Kegiatan	4 buku	5 buku
16. Persentase penyelesaian pertanahan	68% (17 Keg)	83%
17. Nilai investasi	900 M	8 T
18. Angka inflasi dan PDRB	6,41% 72476009 (000)	7,43%
19. Angka Laju Pertumbuhan Ekonomi	10,17	8.81
20. Angka Prasarana, Sarana dan Utilitas	100% (8 keg)	100% (8 keg)
21. Penganekaragaman pangan	2	2
22. Persentase realisasi anggaran	61.28%	72,56%
23. Persentase administrasi batas wilayah	100% (PBU 50 buah, PBA 50 buah)	PBU : 30, PBA : 50
24. Jumlah operasi dalam rangka mewujudkan trantib	13	13
25. Persentase penerbitan rekomendasi pemanfaatan tanah Negara	97.61% (164 Rekom)	3.385



INDIKATOR KINERJA UTAMA	TAHUN 2013	TAHUN 2014
1	2	3
26. Angka kriminalitas	2.189	2.673
27. Cakupan penanganan bencana	69	249

**Sasaran 2**  
**Melaksanakan penataan perundang-undangan**

INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	%	PROGRAM KEGIATAN	
1	2	3	4	5	
1. Persentase penerbitan Peraturan Daerah	80%	90%	112.5%	Penataan Perundang-undangan	
2. Jumlah sosialisasi dan desimilasi Perda dan produk hukum lainnya	34	34	100%		
3. Jumlah : ➤ Perda ➤ Perwal ➤ Keputusan	6 15 500	19 41 778	317% 273% 156%		
4. Persentase keluarga sadar hukum	100%	90%	90%		
5. Jumlah pelanggaran PERDA	400 berkas	15.045 berkas	3.761%		-
6. Persentase penyelesaian perkara hukum	2 perkara	2 perkara	100%		Penyusunan Legal Opinion

Dibandingkan dengan rencana strategis Sekretariat Daerah Kota Balikpapan pada target tahun 2014, pencapaian sasaran 2 melaksanakan penataan perundang-undangan telah melebihi target yang ditetapkan sehingga diyakini pada akhir tahun capaian perencanaan strategis dapat dipenuhi.

Dalam rangka melaksanakan penataan perundang-undangan di Pemerintah Kota Balikpapan, telah dilaksanakan beberapa program prioritas, antara lain Penyuluhan Produk Hukum, Legislasi Peraturan Perundang-undangan, Pembinaan Keluarga Sadar Hukum, Pelaksanaan penyidikan pelanggaran Peraturan Daerah dan Proses penyelesaian perkara dan pemberian bantuan hukum.

Pada Tahun 2013 jumlah produk hukum berupa Peraturan Daerah yang di setuju oleh DPRD untuk diterbitkan jumlahnya sangat sedikit maka untuk target di Tahun 2014 Bagian Hukum Selaku Penata Peraturan Perundang – undangan di Sekretariat Daerah Kota Balikpapan Menargetkan Tidak Terlalu jauh dari tahun sebelumnya. Tetapi di karenakan pada Tahun 2014 Massa Jabatan Anggota DPRD akan Berakhir maka banyak Peraturan Daerah yang di terbitkan sehingga persentasenya melebihi 100%.

Pada program Legislasi Peraturan Perundang-undangan khususnya Penetapan Peraturan Wali Kota mengalami kenaikan menjadi 41 Peraturan Wali Kota Ditahun 2014 dimana di tahun 2014 program kegiatan yang memiliki dasar hukum yang lebih tinggi mengalami peningkatan sehingga di perlukan Perwali untuk menjalankan program kegiatan tersebut di daerah.

Untuk Keputusan Wali Kota di tahun 2014 mengalami penurunan di bandingkan dari tahun 2013 menjadi 778 keputusan Wali kota hal ini di karenakan pada tahun 2014 ada pendelegasian kewenangan penandatanganan kepada Kepala SKPD, dimana kegiatan yang tidak melibatkan pihak luar atau hanya program kegiatan di interen SKPD cukup di tanda tangani oleh masing – masing kepala SKPD saja.

Jumlah pelanggaran Peraturan Daerah mengalami kenaikan di tahun 2014 menjadi 15.045 berkas dibandingkan pada tahun 2013 yaitu 400 berkas kenaikan ini mengalami peningkatan sebanyak 3.761% di karenakan terjadinya peralihan

penanganan dimana pada tahun 2013 pelanggaran perda dibawah Pengawasan bagian hukum yang hanya meliputi Tindak Pidana Ringan (Pelanggaran KTP dan MIRAS saja) sedangkan untuk tahun 2014 Pelanggaran Perda di bawah Pengawasan Satpol PP. Pelanggaran perda ini disebabkan karena :

1. meningkatnya jumlah penduduk pendatang dari luar Kota Balikpapan untuk mencari kerja.
2. Jenis pelanggaran Perda yang di bawah Pengawasan Satpol PP Meliputi:
  - a. Pelanggaran KTP
  - b. Pelanggaran PKL
  - c. PSK
  - d. Miras
  - e. IMB
  - f. Galian C
  - g. Anjal/gepeng/Anak Punk
  - h. Izin Gangguan
  - i. Orang Gila
  - j. Reklame, Spanduk dan sejenisnya
  - k. Algaka
  - l. Petasan / Mercon
  - m. Pelanggaran Lainnya (PerWali dan Surat Edaran Wali Kota )

Demikian juga dengan penanganan perkara hukum, dari target 12 perkara ditahun 2014 yang di mana perkara tersebut merupakan kumpulan dari perkara yang belum selesai di tahun sebelumnya dikarenakan adanya tindakan banding ke tingkat peradilan yang lebih tinggi. Dan di tahun 2014 ada 2 kasus yang telah dapat diselesaikan dengan incrah.

Pencapaian sasaran strategis kedua ini, jika dibandingkan dengan capaian tahun 2013 adalah sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA UTAMA	TAHUN 2013	TAHUN 2014
1	2	3
1. Persentase penerbitan Peraturan Daerah	90%	90%
2. Jumlah sosialisasi dan desimilasi Perda dan produk hukum lainnya	34	34
3. Jumlah :		
➤ Perda	9	19
➤ Perwal	39	41
➤ Keputusan	919	778
4. Persentase keluarga sadar hukum	12 kelurahan	5 Kelurahan
5. Jumlah pelanggaran PERDA	300 berkas	15.045
6. Persentase penyelesaian perkara hukum	4 perkara	2 perkara

### Sasaran 3

#### Meningkatnya hubungan kerja

INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	%	PROGRAM KEGIATAN
1	2	3	4	5
1. Jumlah <i>coffee morning</i>	60	52	87%	-
2. Jumlah rapat MUSPIDA	23	24	104,35%	Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah

INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	%	PROGRAM KEGIATAN
1	2	3	4	5
3. Jumlah kunjungan kerja ke Pemkot Balikpapan	76	63	83%	Fasilitasi Penerimaan Kunjungan Kerja Pemerintah Daerah dan DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota
4. Jumlah kegiatan Kepala Daerah	250	568	227%	Pelaksanaan acara kedinasan dan penerimaan tamu pemerintah kota Balikpapan di luar jam kerja
5. Persentase tindak lanjut hasil <i>coffee morning</i>	100%	100%	100%	-
6. Jumlah jumpa pers	24	25	104%	Kerjasama Informasi dan Media Massa
7. Jumlah talk show	12	12	100%	Kerjasama Informasi dan Media Massa
8. Jumlah kerjasama	3	5	100%	3 Program Kegiatan

Dibandingkan dengan rencana strategis Sekretariat Daerah Kota Balikpapan pada target tahun 2014, pencapaian sasaran 3 meningkatnya hubungan kerja telah melebihi target yang ditetapkan sehingga diyakini pada akhir tahun capaian perencanaan strategis dapat dipenuhi.

Jumlah Kegiatan Kepala Daerah pada tahun 2014 mengalami kenaikan yang sangat besar dibandingkan Tahun 2013 yaitu 227 % hal ini terjadi karena pada kegiatan di tahun 2014 yang cakupan kegiatan atau undangan skala Kecil (kegiatan di tingkat RT) di hadiri langsung oleh Bapak Wali Kota Balikpapan, ditambah lagi meningkatnya Undangan yang Berskala Nasional (Undangan dari Pemerintah Pusat) maupun Daerah (undangan dari Provinsi).

Dalam rangka peningkatan kerjasama antar Pemerintah Daerah, dilaksanakan kegiatan antara lain :

1. Kegiatan Apeksi
2. Citynet Asia Pasifik
3. Citynet Indonesia Chapter
4. AKOPSI
5. FORSESDASI
6. Forum Kerjasama Pemerintah Kota Balikpapan dengan pihak Ketiga

Naskah kerjasama yang telah diperjanjikan pada tahun 2013, antara lain :

1. Kerjasama bidang pendidikan dan pelatihan
2. Penyusunan strategi pembangunan kota rendah emisi
3. Diklat dasar pengukuran dan pemetaan kadastral bagi juru ukur di lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan
4. Kerjasama jaringan lintas perkotaan
5. Pengiriman diklat SIG.

Pemerintah Kota Balikpapan pada tahun 2014 telah menerima kunjungan kerja dari Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota serta Lembaga lainnya sejumlah 63 Kegiatan dengan rincian sebagai berikut :

1. DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten Kota : 39 kegiatan
2. Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota : 15 kegiatan
3. Lembaga lainnya : 9 kegiatan.

Pencapaian sasaran strategis ketiga ini, jika dibandingkan dengan capaian tahun adalah sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA UTAMA	TAHUN 2013	TAHUN 2014
1	2	3
1. Jumlah <i>coffee morning</i>	52	52
2. Jumlah rapat MUSPIDA	22 Kegiatan	24
3. Jumlah kunjungan kerja ke Pemkot Balikpapan	74	63
4. Jumlah kegiatan Kepala Daerah	236	568
5. Persentase tindak lanjut hasil <i>coffee morning</i>	100%	100%
6. Jumlah jumpa pers	13	25
7. Jumlah talk show	12	12
8. Jumlah kerjasama	5	5

#### Sasaran 4

#### Meningkatnya professional dan kesejahteraan aparatur

INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	%	PROGRAM KEGIATAN
1	2	3	4	5
1. Jumlah kebijakan yang diterbitkan di bidang aparatur	1 draft Perwal	1 draft Perwal	100%	-

Dibandingkan dengan rencana strategis Sekretariat Daerah Kota Balikpapan pada target tahun 2014, pencapaian sasaran 4 meningkatnya professional dan kesejahteraan aparatur telah mencapai target yang ditetapkan sehingga diyakini pada akhir tahun capaian perencanaan strategis dapat dipenuhi.

Dalam rangka Peningkatan Profesionalisme dan kesejahteraan aparatur Pegawai Negeri Sipil Dilingkungan pemerintah Kota Balikpapan, maka pada tahun 2014 telah ditetapkan Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 8 Tahun 2014 tentang Tambahan penghasilan Berupa Tunjangan Kerja Kepada Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan. Didalam peraturan ini selain mengatur pemberian tunjangan kerja, juga mengatur sanksi terhadap pelanggaran disiplin kerja yang berdampak pada pemotongan tunjangan kerja.

Perbandingan capaian sasaran tahun sebelumnya tergambar sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA UTAMA	TAHUN 2013	TAHUN 2014
1	2	3
1. Jumlah kebijakan yang diterbitkan di bidang aparatur	2	1

#### Sasaran 5

**Penguatan ketatalaksanaan, kelembagaan dan akuntabilitas kinerja  
Meningkatnya professional dan kesejahteraan aparatur**

INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	%	PROGRAM KEGIATAN
1	2	3	4	5
1. Persentase jumlah dokumen AKIP SKPD	100 %	100%	100%	-

INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	%	PROGRAM KEGIATAN
1	2	3	4	5
2. Persentase SKPD yang menyampaikan LAKIP tepat waktu	100 %	100%	100%	
3. Persentase SKPD yang menyampaikan laporan kegiatan bulanan tepat waktu	100%	95%	95%	Pengembangan Sistem Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan
4. Persentase SKPD yang memiliki SOP	100%	100%	100%	-
5. Persentase SKPD yang memiliki uraian jabatan	100%	100%	100%	Penyempurnaan dan Penataan Kelembagaan
6. Persentase Jabatan yang memiliki standar kompetensi jabatan	80%	80%	100%	
7. Persentase SKPD yang mendapatkan nilai BB pada penilaian Lakip	70%	10%	14.28%	-
8. Persentase SKPD yang telah uji coba <i>paperless office</i>	100% (3 SKPD)	100% (3 SKPD)	100%	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
9. Persentase PPID Pembantu di SKPD	100%	100%	100%	-

Dibandingkan dengan rencana strategis Sekretariat Daerah Kota Balikpapan pada target tahun 2014, pencapaian sasaran 5 Penguatan ketatalaksanaan, kelembagaan dan akuntabilitas kinerja telah mencapai target yang ditetapkan sehingga diyakini pada akhir tahun capaian perencanaan strategis dapat dipenuhi.

Penguatan ketatalaksanaan, kelembagaan dan akuntabilitas kinerja di Sekretariat daerah Kota Balikpapan khususnya dan Pemerintah Kota Balikpapan pada umumnya dilaksanakan melalui program Penyusunan LAKIP Kota Balikpapan Tahun 2014, Pengembangan Sistem Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan, Penyusunan dan Evaluasi SOP SKPD, Revisi Kelembagaan, Uji Coba Implementasi paperless Office dan PPID.

Pada indikator persentase SKPD yang telah memiliki SOP, pada tahun 2014 berdasarkan Keputusan Wali Kota Balikpapan Nomor 188.45-502/2013 Tanggal 16 Juli 2013 Tentang Tim Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) pada 34 SKPD dan Tahun 2014 telah dilaksanakan Penyusunan SOP pada 34 SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan, dengan jumlah SOP sebanyak 18 SOP.

Tahun 2014 penyusunan SOP dilaksanakan pada 34 SKPD penyusunan SOP yaitu Seluruh Kelurahan Kota Balikpapan.

Tahun 2014 SKPD yang memiliki nilai BB dari 30 SKPD yang dinilai 3 SKPD yang mendapatkan nilai BB. Masih banyak prosedur yang belum di penuhi oleh SKPD dalam Pembuat LAKIP antara lain :

1. Melaksanakan evaluasi terhadap Renstra, terutama mengenai penetapan indikator kinerja tujuan (IKT), tidak diselaraskan sasaran, indikator sasaran dan program dengan kondisi terkini.
2. Dalam menetapkan indikator kinerja tujuan dan sasaran tidak memperhatikan pemenuhan kriteria indikator yang baik (SMART dan Cukup), sehingga target yang ditetapkan juga memenuhi kriteria yang baik berdasarkan basis data yang memadai dan andal
3. Melakukan reviu secara berkala terhadap dokumen Renstra agar hasilnya selalu relevan dengan kondisi saat ini dan apabila dilakukan revisi, tidak dituangkan ke dalam berita acara hasil revisi

4. PK yang ditandatangani hendaknya tidak hanya dijadikan dasar untuk mengukur dan menyimpulkan keberhasilan maupun kegagalan saja, namun dapat dijadikan dasar pemberian reward and punishment. Oleh karena itu, disarankan untuk menyusun mekanisme dan implementasi *reward and punishment* terhadap keberhasilan atau kegagalan pencapaian target kinerja;
5. Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah disusun, tidak dijadikan dasar penetapan sasaran dalam revisi Renstra;
6. IKU yang telah disusun dan direviu secara berkala tidak dimanfaatkan untuk penilaian kinerja serta digunakan untuk pengendalian dan pemantauan kinerja secara berkala.
7. Pengukuran indikator kinerja sasaran tidak disajikan secara relevan dan cukup memadai untuk mengindikasikan (mencerminkan) terwujudnya seluruh sasaran dan tujuan strategis yang ditetapkan dalam Renstra.

Program penataan/evaluasi kelembagaan pada tahun 2014 dilaksanakan dengan melakukan penyusunan uraian jabatan 16 SKPD, evaluasi jabatan 29 SKPD dan penyusunan Standar Kompetensi Jabatan Struktural 29 SKPD.

Implementasi dalam program *paperless system* (**SIMAYA milik Kominfo**) di Kota Balikpapan berada pada tataran uji coba. Untuk menyesuaikan dengan program pemerintah Pusat maka program uji coba *paperless system* di Kota Balikpapan dilaksanakan pada BKD, Bagian Umum dan Perlengkapan serta Bagian Organisasi. Dikarenakan aplikasi ini masih dijalankan melalui sistem di Kementrian Kominfo, sehingga aksesnya sangat lambat, sehingga tidak optimal jika diterapkan ke seluruh SKPD.

Dalam rangka keterbukaan informasi, Pemerintah Kota Balikpapan telah membentuk Pejabat Pengelolaan Informasi Daerah (PPID) Kota Balikpapan dan Pejabat Pengelolaan Informasi Daerah Pembantu (PPID Pembantu) pada masing-masing SKPD di Lingkup Pemerintah Kota Balikpapan. Pada tahun 2014 seluruh SKPD Sebanyak 68

SKPD telah Membentuk PPID pembantu, dan Bagian Humas dan Protokol Setdakot Balikpapan Selaku PPID Utama.

Perbandingan capaian sasaran tahun sebelumnya tergambar sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA UTAMA	TAHUN 2013	TAHUN 2014
1	2	3
1. Persentase jumlah dokumen AKIP SKPD	100%	100%
2. Persentase SKPD yang menyampaikan LAKIP tepat waktu	100%	100%
3. Persentase SKPD yang menyampaikan laporan kegiatan bulanan tepat waktu	97.01%	95%
4. Persentase SKPD yang memiliki SOP	100%	100%
	31 SKPD/Unit Kerja	34 SKPD/Kelurahan
5. Persentase SKPD yang memiliki uraian jabatan	84,6 % 11 SKPD	100%
6. Persentase jabatan yang telah memiliki standar kompetensi jabatan		80%
7. Persentase SKPD yang mendapatkan nilai BB pada penilaian LAKIP	-	10%
8. Persentase SKPD yang telah uji coba <i>paperless office</i>	65%	100%
9. Persentase PPID Pembantu di SKPD	100%	100%

### Sasaran 6

#### Meningkatnya sistem pengelolaan Sarana dan prasarana

INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	%	PROGRAM KEGIATAN
1	2	3	4	5
1. Tersedianya rencana kebutuhan barang	10	10	100%	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
2. Tersedianya sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan Tupoksi	12	12	100%	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

Dibandingkan dengan rencana strategis Sekretariat Daerah Kota Balikpapan pada target tahun 2014, pencapaian sasaran 6 meningkatnya sistem pengelolaan sarana dan prasarana telah mencapai target yang ditetapkan sehingga diyakini pada akhir tahun capaian perencanaan strategis dapat dipenuhi.

Rencana Kebutuhan Barang yang disusun oleh Bagian Umum dan Perlengkapan Sekretariat Daerah Kota Balikpapan merupakan hasil pendataan dari rencana kebutuhan barang masing-masing Bagian di lingkup Sekretariat Daerah Kota Balikpapan.

Dalam rangka pelaksanaan tupoksi Sekretariat Daerah Kota Balikpapan Tahun 2014, telah dilaksanakan kegiatan penyediaan sarana dan prasarana aparatur yang meliputi :

1. Pengadaan Kendaraan Dinas dan Operasional (R4 1 unit dan R6 1 unit)
2. Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas

3. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
4. Penyediaan Jasa dan Fasilitas Dukungan Kegiatan Pemerintah Kota
5. Materisasi Penerangan Jalanan Umum (PJU)
6. Pembayaran Rekening Bulanan Penerangan Jalanan Umum (PJU)
7. Pemeliharaan Rutin/Berkala Penerangan Jalan Umum (PJU)
8. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
9. Penyediaan Jasa Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor
10. Pengadaan Dan Pemasangan Penerangan Jalan Umum Baru
11. Rehabilitas Instalasi Jaringan Listrik Dan Air
12. Penyediaan Jasa Dan Pemeliharaan Rumah Jabatan

Pencapaian sasaran strategis keenam ini, jika dibandingkan dengan capaian tahun adalah sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA UTAMA	TAHUN 2013	TAHUN 2014
1	2	3
1. Tersedianya rencana kebutuhan barang	10 Bagian	10 Bagian
2. Tersedianya sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan Tupoksi	18 Kegiatan	12 Kegiatan

## B. PENGUNGKAPAN AKUNTABILITAS KEUANGAN

Dalam rangka mencapai sasaran strategis Sekretariat Daerah Kota Balikpapan, maka ditetapkan anggaran belanja dan pembangunan daerah (APBD) Sekretariat Daerah Kota Balikpapan tahun anggaran 2014.

APBD Kota Balikpapan pada tahun 2014 yang dialokasikan untuk biaya Sekretariat Daerah Kota Balikpapan adalah sebesar Rp. 345.421.636.723.dengan rincian Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 22.735.375.000dan Belanja Langsung sebesar Rp.322.686.261.723.Realisasi anggaran Sekretariat Dearah Kota Balikpapan sebesarRp. 218.250.760.902,50 dan mencapai persentase 63,18%.

Capaian akuntabilitas keuangan per sasaran strategis pada tahun 2014 digambarkan pada tabel berikut :

NO.	SASARAN STRATEGIS	ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%
1	2	3	4	5
1.	Peningkatan penyelenggaraan administrasi pemerintahan, keuangan, pembangunan, dan kemasyarakatan	Rp. 85.379.962.750	Rp79.875.489.981	94%
2.	Melaksanakan penataan perundang-undangan	Rp. 1.499.871.723	Rp. 635.512.640	42%
3.	Meningkatnya hubungan kerja	Rp. 5.142.962.000	Rp. 3.573.910.785	69%
4.	Meningkatnya profesionalisme dan kesejahteraan aparatur	-	-	-
5.	Penguatan ketatalaksanaan, kelembagaan dan akuntabilitas kinerja	Rp. 592.455.500	Rp. 363.485.870	61%
6.	Meningkatnya sistem pengelolaan sarana dan prasarana	Rp. 83.134.250.000	Rp. 76.200.717.573	92 %

## BAB IV PENUTUP

### A. KESIMPULAN

Sebagai bagian penutup dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) Sekretariat Daerah Kota Balikpapan Tahun 2014, dapat disimpulkan bahwa secara umum Sekretariat Daerah Kota Balikpapan telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang signifikan atas sasaran-sasaran strategisnya. Pada tahun 2014 terdapat 6 (enam) sasaran strategis dan 53 (limapuluh tiga) indikator kinerja.

Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi pemerintah sebagai jabaran dari visi, misi dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik, pada hakikatnya adalah proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipatif, adanya kepastian hukum, kesetaraan, efektif dan efisien. Prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan demikian merupakan landasan bagi penerapan kebijakan yang demokratis yang ditandai dengan menguatnya kontrol dari masyarakat terhadap kinerja pelayanan publik.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap 6 (enam) sasaran strategis dan 53 (limapuluh tiga) indikator kinerja, disimpulkan bahwa :

1. Pencapaian sasaran 1

Sasaran 1 terdiri dari 27 indikator kinerja dengan realisasi capaian 102.7%.

2. Pencapaian Sasaran 2

Sasaran 2 terdiri dari 6 indikator kinerja dengan realisasi mencapai 144%.

3. Pencapaian Sasaran 3

Sasaran 3 terdiri dari 8 indikator kinerja dengan realisasi mencapai 113%.

4. Pencapaian Sasaran 4

Sasaran 4 terdiri dari 1 indikator kinerja dengan realisasi mencapai 100%.

5. Pencapaian Sasaran 5

Sasaran 5 terdiri dari 9 indikator kinerja dengan realisasi mencapai 89.92%.

6. Pencapaian Sasaran 6

Sasaran 6 terdiri dari 2 indikator kinerja dengan realisasi mencapai 100%.

Berdasarkan hasil evaluasi dan analisis terhadap 6 sasaran beserta indikatornya, pencapaian sasaran kinerja Sekretariat Daerah Kota Balikpapan menunjukkan trend yang baik untuk mencapai target akhir Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kota Balikpapan. Walau demikian masih terdapat beberapa indikator sasaran yang capaiannya belum seperti diharapkan sehingga harus mendapat perhatian dan peningkatan pada tahun-tahun berikutnya.

Akhirnya, secara umum dapat disimpulkan bahwa pencapaian target terhadap beberapa indikator yang dicantumkan dalam Renstra Sekretariat Daerah Kota Balikpapan Tahun 2011-2016 khususnya untuk Tahun Anggaran 2014 sebagaimana Indikator Kinerja Utama Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah Kota Balikpapan Tahun 2011-2016, dapat dipenuhi sesuai dengan harapan. Namun demikian segala kekurangan dan ketidaksempurnaan tentunya harus menjadi motivasi untuk lebih baik lagi di esok hari.

**B. SARAN**

Untuk mengatasi segala tantangan dan hambatan seperti yang disebutkan di atas maka strategi pemecahan masalahnya dalam upayanya untuk lebih meningkatkan kinerja Sekretariat Daerah ke depan adalah:

- 1) Peningkatan koordinasi antar Bagian
  - Semakin intensifnya rapat koordinasi antar bagian yang terintegrasi dalam satu kesatuan visi dan pemahaman dengan dikoordinasikan oleh Asisten.
  - Adanya konsistensi yang bulat dan utuh dari kesatuan visi dan pemahaman yang telah disepakati bersama dengan implementasinya di lapangan.
- 2) Peningkatan Sumber Daya Manusia
  - Pendidikan dan pelatihan dengan metode dan kurikulum yang reformatif yang disesuaikan dengan tuntutan masyarakat dan beban kerja yang lebih kompleks.
  - Pembinaan mental spiritual aparatur Pemerintah Daerah.
- 3) Adanya pemisahan yang tegas antara fungsi Sekretariat Daerah sebagai Organizing, staffing, coordinating, facilitating, servicing, dan Advising dengan fungsi Dinas sebagai Designing, operating, actuating. Sehingga fungsi pelaksana teknis operasional pelayanan yang sifatnya langsung kepada masyarakat ditangani sepenuhnya oleh Dinas. Sementara Sekretariat Daerah hanya memberikan servis (pelayanannya) fokus kepada Walikota dan Perangkat Daerah. Pemisahan fungsi secara tegas ini hanya dalam urusan pengelolaan suatu program kegiatan agar tidak terjadi duplikasi dan tumpang tindih kewenangan dan anggaran.

**SEKRETARIS DAERAH KOTA BALIKPAPAN**



**SAYID MN FADLI**  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19620509 198701 1 001

## RENCANA KINERJA TAHUNAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

: SEKRETARIAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN

TAHUN ANGGARAN

: 2014

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET
1	2	3	4
1	Peningkatan penyelenggaraan administrasi pemerintahan, keuangan, pembangunan, dan kemasyarakatan	1 Jumlah RT	1541
		2 Persentase Kelurahan berprestasi Tk. Kota	35,29%
		3 Persentase RT yang memiliki administrasi baik	60,54%
		4 Jumlah prestasi / penghargaan yang diterima Kota Balikpapan (Tk. Propinsi, Nasional dan Internasional)	32
		5 Persentase penduduk yang memiliki KTP	89%
		6 Persentase penduduk yang memiliki akta kelahiran	65%
		7 Persentase SKPD yang telah melaksanakan IKM	66%
		8 Angka kemiskinan	10112 RTS
		9 Persentase pengadaan barang dan jasa melalui e-procurement	70%
		10 Persentase permohonan bansos yang dapat ditindak lanjuti	85%
		11 Persentase permohonan hibah yang dapat ditindak lanjuti	90%
		12 Jumlah SKPD yang telah menerapkan Sistem Informasi Manajemen/aplikasi	53%
		13 Persentase proporsi belanja langsung dan belanja tidak langsung.	100%
		14 Persentase penyerapan anggaran belanja barang dan jasa	70%
		15 Jumlah dokumen Laporan Kegiatan	120
		16 Persentase penyelesaian pertanahan	70%
		17 Nilai investasi	5T
		18 a. Angka inflasi	6.41%
		b. Angka PDRB	80803005(000)
		19 Angka Laju Pertumbuhan Ekonomi	10.6%
		20 Angka Prasarana, Sarana dan Utilitas	
		Jumlah angkutan	1945

		jumlah pasar tradisional	17
		jumlah rumah sakit	91
		jumlah hotel	63
		Jumlah Restoran	390
		Jumlah Toko/ supermarket	14
		Jumlah Bank	143
		Ketersediaan listrik	191.169,70
		21 Penganekaragaman pangan	2
		22 Persentase realisasi anggaran	75%
		23 Persentase administrasi batas wilayah	100%
		24 Jumlah operasi dalam rangka mewujudkan trantib	125
		25 Persentase penerbitan rekomendasi pemanfaatan tanah Negara	320
		26 Angka kriminalitas	21
		27 Cakupan penanganan bencana	120
2	Melaksanakan penataan perundang-undangan	28 Persentase penerbitan Peraturan Daerah	90%
		29 Jumlah sosialisasi dan desimilasi Perda dan produk hukum lainnya	100
		30 Jumlah :	
		1. Perda	15
		2. Perwal	20
		3. Keputusan	400
		31 Persentase keluarga sadar hukum	100%
		32 Jumlah pelanggaran PERDA	500
		33 Persentase penyelesaian perkara hukum	80%
3	Meningkatnya hubungan kerja	34 Jumlah <i>coffee morning</i>	52
		35 Jumlah rapat MUSPIDA	23
		36 Jumlah kunjungan kerja ke Pemkot Balikpapan	12
		37 Jumlah kegiatan Kepala Daerah	254
		38 Persentase tindak lanjut hasil <i>coffee morning</i>	52
		39 Jumlah jumpa pers	13
		40 Jumlah talk show	12

4	Meningkatnya profesionalisme dan kesejahteraan aparatur	43	Jumlah kebijakan yang diterbitkan di bidang aparatur	1
5	Penguatan ketatalaksanaan, kelembagaan dan akuntabilitas kinerja	44	Persentase Jumlah dokumen AKIP SKPD	100%
		45	Persentase SKPD yang Menyampaikan Lakip Tepat waktu	100%
		46	Persentase SKPD yang menyampaikan laporan kegiatan bulanan tepat waktu	80%
		47	Persentase SKPD yang memiliki SOP	75%
		48	Persentase SKPD yang memiliki uraian jabatan	76%
		49	Persentase Jabatan yang telah memiliki standar kompetensi jabatan	20%
		50	Persentase SKPD yang mendapat nilai BB pada penilaian LAKIP	50%
		51	Jumlah SKPD yang telah menggunakan <i>paperless office</i>	10
		52	Persentase PPID Pembantu di SKPD	100%
6	Meningkatnya sistem pengelolaan Sarana dan prasarana	53	Tersedianya rencana kebutuhan barang	100%
		54	Tersedianya sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan Tupoksi	100%

SEKRETARIS DAERAH KOTA BALIKPAPAN



SAYID MN FADLI  
Pembina Utama Madya  
19620509 198701 1 001

**PENGUKURAN KINERJA  
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2014  
BERDASARKAN REVISI INDIKATOR KINERJA UTAMA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	%	PROGRAM KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%	UNIT KERJA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Peningkatan penyelenggaraan administrasi pemerintahan, keuangan, pembangunan, dan kemasyarakatan	1 Jumlah RT	1542	1542	100	Penilaian lomba Pengelola Terbaik Administrasi RT Tingkat Kota Balikpapan	Rp -	Rp -	-	-	Bagian Pemerintahan
		2 Persentase Kelurahan berprestasi Tk. Kota	6	6	100	Pembinaan dan pemberian reward Lurah berprestasi 2013	Rp 250,000,000	Rp 240,543,750	96%		Bagian Pemerintahan
		3 Persentase RT yang memiliki administrasi baik	6	6	100	Pengadaan buku Administrasi Kecamatan, Kelurahan dan RT					Bagian Pemerintahan
		4 Jumlah prestasi / penghargaan yang diterima Kota Balikpapan (Tk. Propinsi, Nasional dan Internasional)	20	42	210	-	Rp -	Rp -	-	-	Bagian Humaspro
		5 Persentase penduduk yang memiliki KTP	100	85	85%	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Rp -	Rp -	-	0%	Disdukcapil
		6 Persentase penduduk yang memiliki akta kelahiran	90	80	89%	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Rp -	Rp -	-	0%	Disdukcapil
		7 Persentase SKPD yang telah melaksanakan IKM	100%	100%	100%	Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat	Rp 150,000,000	Rp 132,454,505	88%		Bagian Organisasi
		8 Angka kemiskinan	10,122	7,782	77%	Operasional Program Raskin	Rp 444,676,000	Rp 375,785,000	85%		Bagian Perekonomian
		9 Persentase pengadaan barang dan jasa melalui LPSE	400 paket	447 paket	112%	kelompok Kerja ULP	Rp 773,000,000	Rp 444,991,010	58%		Bagian Pembangunan
		10 Persentase permohonan bansos yang dapat ditindak lanjuti	90	76	84%	Program Bantuan sosial Pemerintah Kota Balikpapan Kepada Anggota Masyarakat	Rp 9,000,000,000	Rp 6,819,215,000	76%		Bagian kesra
		11 Persentase permohonan hibah yang dapat ditindak lanjuti	95	100	105%	Program Pemberian hibah Pemerintah kota Balikpapan Kepada Badan/ Lembaga/ Organisasi	Rp 64,906,853,250	Rp 64,603,138,410	100%		Bagian Kesra
		12 Jumlah SKPD yang telah menerapkan Sistem Informasi Manajemen/aplikasi	67	67%	100%	Pengembangan komunikasi, informasi dan media massa	Rp 2,963,488,000	Rp 2,846,295,308	96%		Bagian Organisasi
		13 Persentase proporsi belanja langsung dan belanja tidak langsung.	BL : 75% BTL : 25%	BL : 73,04% BTL : 26,96%	BL : 97% BTL : 107%	8 Program Kegiatan	-	-	-	-	Bagian Pembangunan

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	%	PROGRAM KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%	UNIT KERJA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		14 Persentase penyerapan anggaran belanja barang dan jasa	70%	81%	116%	8 Program Kegiatan	Rp 500,000,000	Rp 309,725,040	62%	Bagian Pembangunan
		15 Jumlah dokumen Laporan Kegiatan	5 buku	5 buku	100%	Pengembangan Sistem Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan	Rp 277,455,500	Rp 123,174,826	44%	Bagian Pembangunan
		16 Persentase penyelesaian pertanahan	100%	83%	83%	Penyelesaian Konflik-konflik pertanahan	Rp 57,800,000	Rp 35,073,000	61%	Bagian KDAWP
		17 Nilai investasi	5 T	8		-	-	-	-	Bagian Perekonomian
		18 Angka inflasi dan PDRB	6	7	124%	-	-	-	-	Bagian Perekonomian
		19 Angka Laju Pertumbuhan Ekonomi	11	9	83%	-	-	-	-	Bagian Perekonomian
		20 Angka Prasarana, Sarana dan Utilitas	207,215	3,950,202	1906%	-	-	-	-	Bagian Perekonomian
		a. Jumlah angkutan	1,945	2,190	113%	-	-	-	-	
		b. Jumlah pasar tradisional	17	17	100%	-	-	-	-	
		c. Jumlah rumah sakit	91	101	111%	-	-	-	-	
		d. Jumlah hotel	63	72	114%	-	-	-	-	
		E. Jumlah Restoran	390	424	109%	-	-	-	-	
		f. Jumlah Toko/ supermarket	14	25	179%	-	-	-	-	
		g. Jumlah Bank	143	176	123%	-	-	-	-	
		h. Ketersediaan Listrik	204,552	3,947,197	193%	-	-	-	-	
		21 Penganeekaragaman pangan	2	2	100%	Diversifikasi Pangan	Rp 100,000,000	Rp 71,174,186	71%	Bagian Perekonomian
		22 Persentase realisasi anggaran	80%	72.68%	90.85%	Penyusunan Laporan dan Realisasi Anggaran Setdakot Balikpapan	-	-	-	Bagian Keuangan
		23 Persentase administrasi batas wilayah	PBU : 30, PBA : 50	PBU : 30, PBA : 50	100%	Penataan Daerah Otonomi Baru	Rp 1,262,540,000	Rp 837,425,517	66%	Bagian KDAWP
		24 Jumlah operasi dalam rangka mewujudkan trantib	13	13	100%	Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Rp 2,200,000,000	Rp 1,891,496,619	86%	Bagian Pemerintahan
		25 Persentase penerbitan rekomendasi pemanfaatan tanah Negara	3,385	3,385	100%	Peninjauan Lokasi, Pengukuran dan Penerbitan izin Membuka/ Memanfaatkan tanah negara	Rp 2,494,150,000	Rp 1,144,997,810	46%	Bagian KDAWP

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	%	PROGRAM KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%	UNIT KERJA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		26 Angka kriminalitas	2,189	2,673	122%	-	-	-	-	Fungsional Polres
		27 Cakupan penanganan bencana	69	249	361%	Penanganan Kejadian Bencana dan kebakaran	-	-	-	Bagian Pemerintahan
2	Melaksanakan penataan perundang-undangan	28 Persentase penerbitan Peraturan Daerah	100%	90%	90%	Penataan Perundang-undangan	Rp 1,199,871,723	Rp 577,312,640	48%	Bagian Hukum
		29 Jumlah sosialisasi dan desimilasi Perda dan produk hukum lainnya	34	34	100%					
		30 Jumlah :								
		1. Perda	6	19	317%					
		2. Perwal	15	41	273%					
		3. Keputusan	500	778	156%					
		31 Persentase keluarga sadar hukum	100%	90%	90%					
		32 Jumlah pelanggaran PERDA	400 berkas	15.045 berkas	3761%	Pelaksanaan penyidikan pelanggaran perda	Rp 150,000,000	-	-	Satpol PP
		33 Persentase penyelesaian perkara hukum	12 perkara	12 perkara	100%	Penyusunan Legal Opinion	Rp 150,000,000	Rp 58,200,000	39%	Bagian Hukum
3	Meningkatnya hubungan kerja	34 Jumlah <i>coffee morning</i>	60	52	87%	-	Rp -	Rp -	-	Bagian Humaspro
		35 Jumlah rapat MUSPIDA	23	24	104%	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/ wakil Kepala Daerah	Rp 2,000,000,000	Rp 1,393,370,800	70%	Bagian Umper
		36 Jumlah kunjungan kerja ke Pemkot Balikpapan	76	76	100%	Fasilitasi Penerimaan Kunjungan Kerja Pemerintah Daerah dan DPRD Provinsi/ Kabupaten/Kota	Rp 273,025,000	Rp 188,182,186	69%	Bagian Pemerintahan
		37 Jumlah kegiatan Kepala Daerah	250	568	227%	Pelaksanaan acara kedinasan dan penerimaan tamu pemerintah kota Balikpapan di luar jam kerja	Rp 385,459,000	Rp 385,459,000	100%	Bagian Humaspro
		38 Persentase tindak lanjut hasil <i>coffee morning</i>	100%	100%	100%	-	Rp -	Rp -	-	Bagian Humaspro
		39 Jumlah jumpa pers	24	25	104%	Kerjasama informasi dan media massa	Rp 168,000,000	Rp 168,000,000	100%	Bagian Humaspro
		40 Jumlah talk show	12	12	100%	Kerjasama informasi dan media massa	Rp 70,500,000	Rp 70,500,000	100%	Bagian Humaspro
		41 Jumlah kerjasama	5	5	100%	3 program Kegiatan	Rp 2,245,978,000	Rp 1,368,398,799	61%	Bagian KDAWP

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	%	PROGRAM KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%	UNIT KERJA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	Meningkatnya profesionalisme dan kesejahteraan aparatur	42 Jumlah kebijakan yang diterbitkan di bidang aparatur	1 draft Perwal	1 draft Perwal	100%	-	-	-	-	Bagian Organisasi
5	Penguatan ketatalaksanaan, kelembagaan dan akuntabilitas kinerja	43 Persentase jumlah dokumen AKIP SKPD	100%	100%	100%	-	-	-	-	Bagian Organisasi
		44 Persentase SKPD yang menyampaikan LAKIP tepat waktu	100%	100%	100%	-	-	-	-	Bagian Organisasi
		45 Persentase SKPD yang menyampaikan laporan kegiatan bulanan tepat waktu	76 SKPD	72 SKPD	95%	Pengembangan sistem evaluasi dan Pelaporan Pembangunan	Rp 277,455,500	Rp 141,826,800	51%	Bagian Pembangunan
		46 Persentase SKPD yang memiliki SOP	34 SKPD	34 SKPD	100%	-	-	-	-	Bagian Organisasi
		47 Persentase SKPD yang memiliki uraian jabatan	100%	100%	100%	Penyempurnaan dan Penataan Kelembagaan	Rp 200,000,000	Rp 156,309,570	78%	Bagian Organisasi
		48 Persentase jabatan yang telah memiliki standar kompetensi jabatan	80%	80%	80%	Penyempurnaan dan Penataan Kelembagaan	Rp 90,000,000	Rp 48,849,500	54%	Bagian Organisasi
		49 Persentase SKPD yang mendapatkan nilai BB pada penilaian LAKIP	70%	70%	70%	-	-	-	-	Bagian Organisasi
		50 Persentase SKPD yang telah menggunakan <i>paperless office</i>	100%	100%	100%	Implementasi Papperless system	Rp 25,000,000	Rp 16,500,000	66%	Bagian Organisasi
		51 Persentase PPID Pembantu di SKPD	100%	100%	100%	-	-	-	-	Bagian Humaspro
6	Meningkatnya sistem pengelolaan Sarana dan prasarana	52 Tersedianya rencana kebutuhan barang	10	10	100%	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Rp -	Rp -	-	Bagian Umper
		53 Tersedianya sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan Tupoksi	12	12	100%	Program peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp 83,134,250,000	Rp 76,200,717,573	92%	Bagian Umper

Balikpapan, Februari 2015

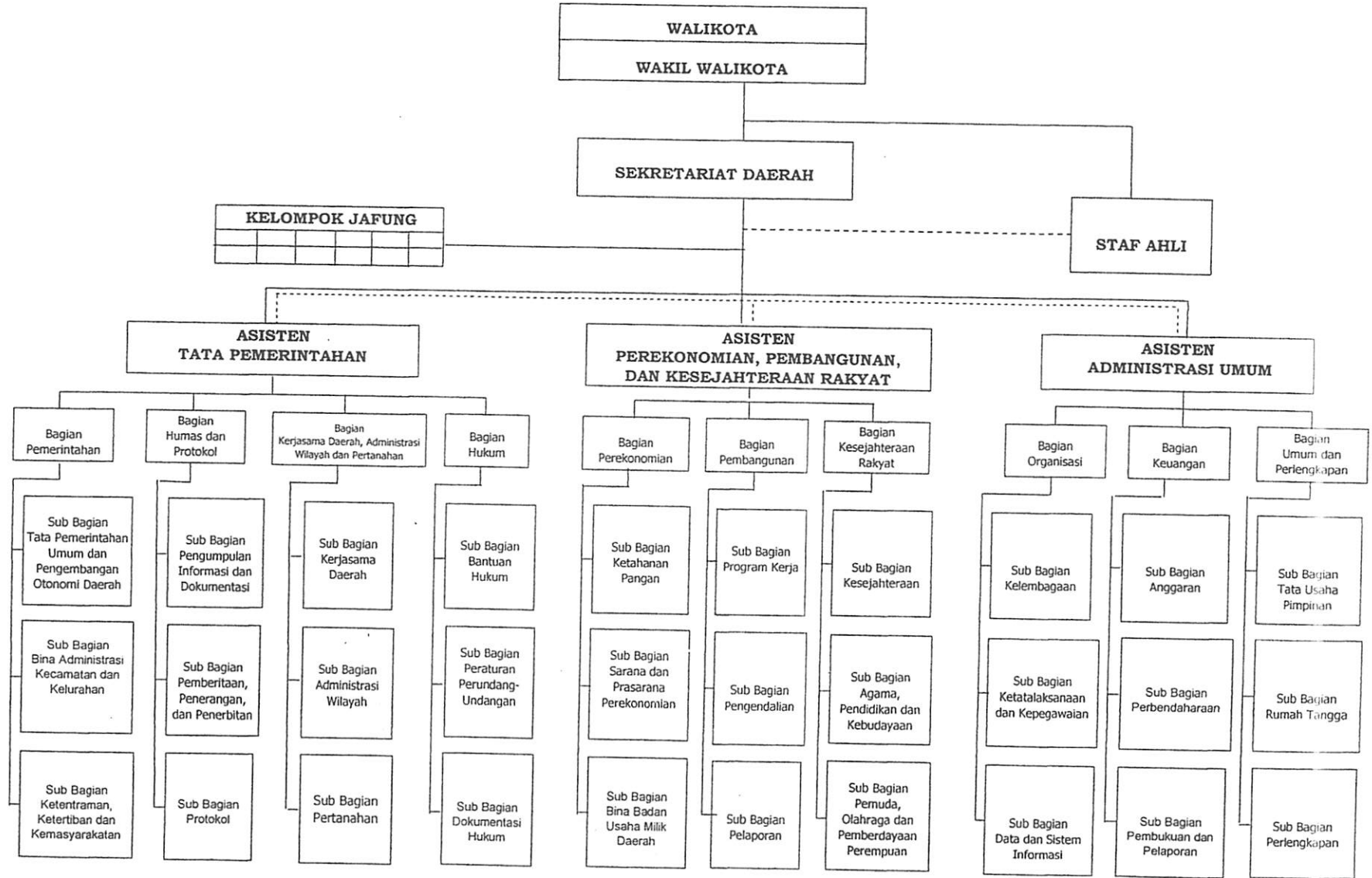
SEKRETARIS DAERAH KOTA BALIKPAPAN

  
**SAYID MN FADLI**

Pembina Utama Madya  
NIP.19620509 198701 1 001

LAMPIRAN I  
 PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN  
 NOMOR 6 TAHUN 2012  
 TENTANG  
 ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH DAN  
 SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH



Salinan sesuai dengan aslinya  
 Sekretariat Daerah Kota Balikpapan  
 Kepala-Ruangan Hukum,

DAUD HIRADE

WALIKOTA BALIKPAPAN,

ttd

M. RIZAL EFFENDI



**KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KOTA BALIKPAPAN**

**NOMOR : 306 TAHUN 2013**

**TENTANG**

**INDIKATOR KINERJA UTAMA**

**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)**

**SEKRETARIAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2011-2016**

**SEKRETARIS DAERAH KOTA BALIKPAPAN,**

- Menimbang :
- a. bahwa demi terarahnya pencapaian visi dan misi Sekretaris Daerah Kota Balikpapan Tahun 2011-2016 yang termuat dalam RENSTRA Sekretariat Daerah Kota Balikpapan tahun 2011-2016 maka diperlukan tolak ukur yang jelas dan sistematis untuk mengukur kinerja pembangunan pada setiap tahun perencanaannya;
  - b. bahwa dalam rangka penguatan terhadap RENSTRA Sekretariat Daerah Kota Balikpapan tahun 2011-2016 maka diperlukan penetapan sasaran strategis sebagai acuan dalam Indikator Kinerja Utama Sekretariat Daerah Kota Balikpapan 2011-2016;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka perlu menetapkan dalam Peraturan Sekretaris Daerah Sekretariat Daerah Kota Balikpapan tentang Indikator Kinerja Utama Rencana Strategis (RENSTRA) Sekretariat Daerah Kota Balikpapan Tahun 2011-2016.

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1959, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);



2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-undang Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Urusan Pemerintahan Antara Pemerintahan, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4014);

9. Peraturan Pemerintahan Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kota Balikpapan (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 2 Seri E Nomor 02 tanggal 8 Oktober 2008);
14. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 6 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Balikpapan (Lembaran Daerah Kota Balikpapan Tahun 2012 Nomor 6);
15. Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 07 Tahun 2013 Tentang Indikator Kinerja Utama Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Balikpapan Tahun 2011-2016.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **INDIKATOR KINERJA UTAMA RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) SEKRETARIAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2011-2016.**

**Pasal 1**

- (1) Indikator Kinerja Utama Rencana Strategis (RENSTRA) Sekretariat Daerah Kota Balikpapan Tahun 2011-2016 adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah Sekretariat Daerah Kota Balikpapan yang berisi sasaran strategis dan indikator kinerja utama untuk kurun waktu 2011-2016 yang merupakan penjabaran dari target kinerja Rencana Strategis (RENSTRA) Sekretariat Daerah Kota Balikpapan Tahun 2011-2016.
- (2) Indikator Kinerja Utama Rencana Strategis (RENSTRA) Sekretariat Daerah Kota Balikpapan Tahun 2011-2016 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Sekretaris Daerah Kota ini.

**Pasal 2**

Bagian di lingkungan Sekretariat Daerah Kota Balikpapan dalam merencanakan program, kegiatan dan indikator kinerjanya wajib mengacu pada Indikator Kinerja Utama Rencana Strategis (RENSTRA) Sekretariat Daerah Kota Balikpapan Tahun 2011-2016 yang diatur dalam Peraturan Sekretaris Daerah Kota ini.

Pasal 3

Peraturan ini berlaku surut mulai tanggal 2 Januari 2013.

Ditetapkan di Balikpapan

Pada tanggal

**SEKRETARIS DAERAH KOTA BALIKPAPAN**



**SAYID MN FADLI**

Lampiran Keputusan Sekretaris Daerah Kota Balikpapan

Nomor :

Tanggal :

Tentang : INDIKATOR KINERJA UTAMA  
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)  
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN  
TAHUN 2011-2016

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SUMBER DATA
1.	Peningkatan penyelenggaraan administrasi pemerintahan, keuangan, pembangunan, dan kemasyarakatan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jumlah RT</li> <li>2. Persentase Kelurahan berprestasi Tk. Kota</li> <li>3. Persentase RT yang memiliki administrasi baik</li> <li>4. Jumlah prestasi/penghargaan yang diterima Kota Balikpapan(Tk. Propinsi, Nasional dan Internasional)</li> <li>5. Persentase penduduk yang memiliki KTP</li> <li>6. Persentase penduduk yang memiliki akta kelahiran</li> <li>7. Persentase SKPD yang telah melaksanakan IKM</li> <li>8. Angka kemiskinan</li> <li>9. Persentase pengadaan barang dan jasa melalui LPSE</li> <li>10. Persentase permohonan bansos yang dapat ditindak lanjuti</li> <li>11. Persentase permohonan hibah yang dapat ditindak lanjuti</li> <li>12. Jumlah SKPD yang telah menerapkan Sistem Informasi Manajemen/aplikasi</li> <li>13. Persentase proporsi belanja langsung dan belanja tidak langsung.</li> <li>14. Persentase penyerapan anggaran belanja barang dan jasa</li> <li>15. Jumlah dokumen Laporan Kegiatan</li> </ol>	<p>Bagian Pemerintahan Bagian Pemerintahan</p> <p>Bagian Pemerintahan</p> <p>Bagian Humas dan Protokol</p> <p>Bagian Pemerintahan</p> <p>Bagian Pemerintahan</p> <p>Bagian Organisasi</p> <p>Bagian Perekonomian Bagian Pembangunan</p> <p>Bagian kesra</p> <p>Bagian Kesra</p> <p>Bagian Organisasi</p> <p>Bagian Pembangunan</p> <p>Bagian Pembangunan</p> <p>Bagian Pembangunan</p>



